

Katalog: 2101038.18



#Mencatat Indonesia

Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung

Peran Penduduk dalam Pembangunan Daerah



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG



Sensus
Penduduk
2020

#Mencatat Indonesia

Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung

Peran Penduduk dalam Pembangunan Daerah



<https://lampung.bps.go.id>

Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung

ISBN: -

Katalog: 2101038.18

No. Publikasi: 18000.2218

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 84 halaman

Naskah: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penyunting: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Gambar Kulit: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Diterbitkan oleh: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pencetak: CV. Jaya Wijaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Pengarah :

Endang Retno Sri Subiyandani

Penanggung Jawab :

Nurul Andriana

Penyunting :

Nurul Andriana

Pengolah Data dan Penulis :

Gun Gun Nugraha

Wike Yulia

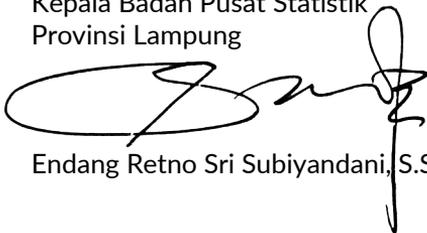
Kata Pengantar

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan. Selain sebagai subjek, penduduk juga berperan sebagai objek pembangunan. Tujuan akhir pembangunan suatu wilayah selalu mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan penduduknya. Namun, menuju dan merealisasikan titik optimal kesejahteraan penduduk pada setiap wilayah memiliki tantangan tersendiri. Prosesnya membutuhkan waktu, bergantung bagaimana strategi dirancang dan proses implementasinya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung telah melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online (SPO) pada Mei 2020 dan wawancara pada September 2020. Salah satu output pelaksanaan SP2020 adalah publikasi Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung. Dalam publikasi ini diuraikan bagaimana dinamika penduduk, profil anak, profil usia produktif, dan profil lansia di Provinsi Lampung. Data-data yang disajikan diambil dari data SP2020 dan survei-survei lain di BPS.

Kepada tim yang sudah menyusun publikasi ini, saya sampaikan apresiasi. Harapannya, semoga publikasi ini memberikan *insight* bagi para pembaca, terutama untuk pemerintah, stakeholder, akademisi, dan konsumen data lainnya.

Bandar Lampung, Juni 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung



Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.



Daftar Isi

	Halaman
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Dinamika Penduduk Provinsi Lampung	1
A. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Peringkat Kedelapan di Indonesia	4
B. Antara Kuantitas dan Kualitas	7
C. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	8
D. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	10
E. Perubahan Struktur Penduduk di Provinsi Lampung	13
F. Implikasi Perubahan Struktur Penduduk di Masa Depan	15
G. Kesimpulan	18
2. Profil Anak	21
A. Anak dalam Bonus Demografi Lampung	23
B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak	26
C. Pendidikan Anak	29
D. Kesehatan Anak	32
E. Pekerja Anak	36
F. Perkawinan Anak	38
G. Kesimpulan	39
3. Profil Penduduk Usia Produktif	41
A. Penduduk Usia Produktif: Motor Penggerak Agenda Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional	44
B. Meretas Jalan Menuju Indonesia Emas (Tren Usia Produktif) ...	46
C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan	49
D. Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan	52
E. Penduduk Usia Produktif Menurut Generasi	57
F. Kesimpulan	59

4. Profil Lansia	61
A. Kualitas Hidup Meningkat, Lampung Menuju <i>Ageing Population</i>	63
B. Lansia SMART	66
C. Sebaran Lansia	68
D. Lansia dan Keluarga	70
E. Perlindungan terhadap Lansia	78
F. Kesimpulan	83

<https://lampung.bps.go.id>



Dinamika Penduduk di Provinsi Lampung

- A. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Peringkat Kedelapan di Indonesia
- B. Antara Kuantitas dan Kualitas
- C. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
- D. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
- E. Perubahan Struktur Penduduk di Provinsi Lampung
- F. Implikasi Perubahan Struktur Penduduk di Masa Depan
- G. Kesimpulan



Pada periode 1971-2020, penduduk Provinsi Lampung mengalami perubahan baik dari sisi struktur, komposisi, maupun sebarannya. Tahun 2020, Provinsi Lampung tengah menikmati bonus demografi.

Dinamika Penduduk di Provinsi Lampung

Tujuan akhir pembangunan suatu wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya (*wellbeing*). Oleh sebab itu, penduduk merupakan pusat segala tujuan kebijakan pembangunan. Selain sebagai subjek, penduduk juga berperan sebagai objek pembangunan. Namun demikian, menuju dan merealisasikan titik optimal kesejahteraan penduduk bukanlah perkara mudah. Prosesnya membutuhkan waktu yang amat panjang, bergantung bagaimana strategi dirancang dan proses implementasinya. Masalah klasik kependudukan selalu timbul dan berputar pada masalah keseimbangan kuantitas dan kualitas beserta dinamikanya. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk dalam suatu wilayah selalu berubah setiap waktu.

Penduduk adalah sejumlah manusia baik individu maupun kelompok yang mendiami suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk di suatu wilayah terus mengalami perubahan. Perubahan jumlah penduduk itulah yang kemudian disebut dengan dinamika penduduk. Secara definitif, dinamika penduduk adalah keadaan perubahan jumlah atau kepadatan populasi penduduk. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Penduduk Provinsi Lampung, seperti halnya penduduk provinsi lain di Indonesia, secara alamiah mengalami perubahan baik dari sisi struktur, komposisi, maupun sebarannya. Hal ini disebabkan akibat kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi).

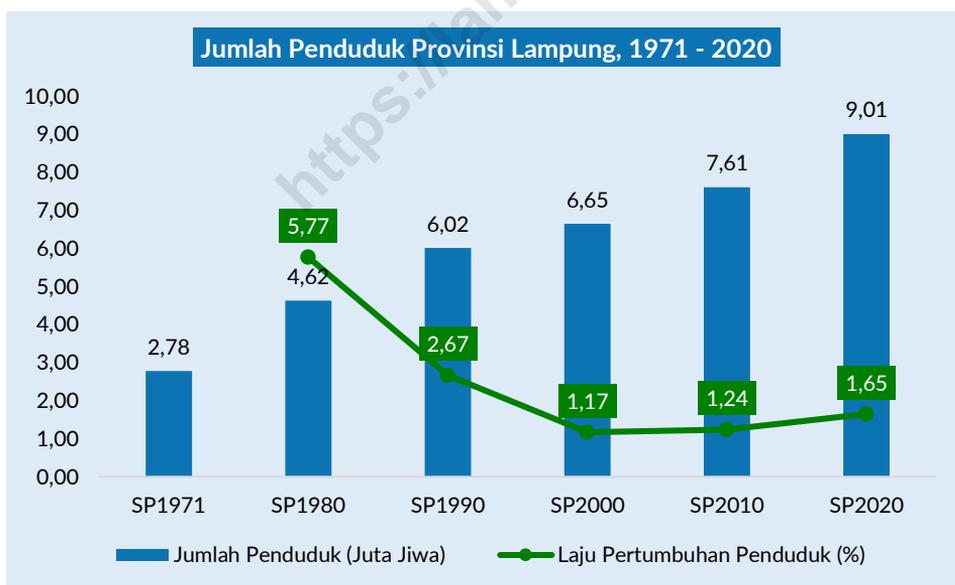
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), struktur dan komposisi penduduk Provinsi Lampung didominasi usia produktif. Dampaknya, hingga saat ini Provinsi Lampung tengah “menikmati” era bonus demografi. Di samping struktur dan komposisi penduduk, sebaran penduduk juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebaran penduduk dapat merepresentasikan gejala pola mobilitas penduduk, pola migrasi, indikator gravitasi ekonomi wilayah, kekuatan ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan gambaran dan informasi bagaimana dinamika penduduk Provinsi Lampung.

Isu utama dalam pembahasan dinamika penduduk masih cukup beragam. Di Provinsi Lampung antara lain perbandingan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan provinsi lain di Indonesia, perbandingan kondisi kependudukan dengan kondisi sosial ekonomi, sebaran penduduk antarwilayah kabupaten/kota, dan perubahan struktur dan komposisi penduduk dari waktu ke waktu.

A. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Peringkat Kedelapan di Indonesia

Penduduk Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 9,01 juta jiwa atau tepatnya 9.007.848 jiwa. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah kedelapan terbanyak di Indonesia atau kedua terbanyak di Pulau Sumatra. *Share* penduduk Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 3,33 persen sedangkan di Sumatra mencapai 15,38 persen.

Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup menjanjikan terutama pada kekuatan pasar tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM). Pada sisi yang lain, banyaknya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM, penyediaan kebutuhan pokok, dan pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita.



Gambar 1.1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung, 1971–2020

Sepanjang sensus penduduk (sepuluh tahun sekali) dilaksanakan di Provinsi Lampung, laju pertumbuhan penduduk tertinggi Provinsi Lampung terjadi di antara tahun 1971 dengan tahun 1980 yang mencapai 5,77 persen. Laju Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 2,31 persen. Sementara pada periode selanjutnya 1980–2020, laju

pertumbuhan penduduk terendah terjadi di antara tahun 1990–2000 yang mencapai 1,17 persen (angka nasional mencapai 1,44 persen). Pada periode terakhir, tahun 2010–2020, laju pertumbuhan mencapai 1,65 persen sedangkan angka nasional mencapai 1,25 persen.



Gambar 1.2. Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Kontribusinya di Indonesia, 2020

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk di Pulau Jawa masih sangat mendominasi penduduk di Indonesia. Separuh lebih penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa (56,10 persen) disusul Pulau Sumatra (21,67 persen). Tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia adalah Jawa Barat yang mencapai 48,27 juta jiwa (17,87 persen) disusul Provinsi Jawa Timur yang mencapai 40,67 juta jiwa (15,05 persen), dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 36,52 juta jiwa (13,51 persen). Provinsi Lampung berada pada posisi urutan ke-8 terbanyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai 9,01 juta jiwa (3,33 persen).

Dinamika penduduk di tiga provinsi terbanyak di Indonesia sepanjang 2010–2020 mengalami tren penurunan kontribusi. Hal ini berbeda dengan kontribusi penduduk di Provinsi Lampung. Kontribusi penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 18,12 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 17,87 persen. Kontribusi penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai 15,77 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 15,05 persen. Kontribusi penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 13,63 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 13,51 persen. Sementara itu, kontribusi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 mencapai 3,20 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 3,33 persen. Terjadinya pergeseran persentase penduduk di provinsi-provinsi besar (seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) dan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia mengalami dinamika.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2020 (Jiwa)

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.647.563	2.627.308	5.274.871
Sumatera Utara	7.422.046	7.377.315	14.799.361
Sumatera Barat	2.786.360	2.748.112	5.534.472
Riau	3.276.658	3.117.429	6.394.087
Jambi	1.810.015	1.738.213	3.548.228
Sumatera Selatan	4.320.078	4.147.354	8.467.432
Bengkulu	1.029.137	981.533	2.010.670
Lampung	4.616.805	4.391.043	9.007.848
Kep. Bangka Belitung	749.548	706.130	1.455.678
Kepulauan Riau	1.053.296	1.011.268	2.064.564
DKI Jakarta	5.334.781	5.227.307	10.562.088
Jawa Barat	24.508.885	23.765.277	48.274.162
Jawa Tengah	18.362.143	18.153.892	36.516.035
DI Yogyakarta	1.817.927	1.850.792	3.668.719
Jawa Timur	20.291.592	20.374.104	40.665.696
Banten	6.070.271	5.834.291	11.904.562
Bali	2.171.105	2.146.299	4.317.404
Nusa Tenggara Barat	2.656.208	2.663.884	5.320.092
Nusa Tenggara Timur	2.663.771	2.661.795	5.325.566
Kalimantan Barat	2.784.113	2.630.277	5.414.390
Kalimantan Tengah	1.385.705	1.284.264	2.669.969
Kalimantan Selatan	2.062.383	2.011.201	4.073.584
Kalimantan Timur	1.961.634	1.804.405	3.766.039
Kalimantan Utara	370.650	331.164	701.814
Sulawesi Utara	1.341.918	1.280.005	2.621.923
Sulawesi Tengah	1.534.706	1.451.028	2.985.734
Sulawesi Selatan	4.504.641	4.568.868	9.073.509
Sulawesi Tenggara	1.330.594	1.294.281	2.624.875
Gorontalo	591.349	580.332	1.171.681
Sulawesi Barat	720.187	699.042	1.419.229
Maluku	936.478	912.445	1.848.923
Maluku Utara	657.411	625.526	1.282.937
Papua Barat	597.128	536.940	1.134.068
Papua	2.294.813	2.008.894	4.303.707
Indonesia	136.661.899	133.542.018	270.203.917

Sumber Tabel : Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

B. Antara Kuantitas dan Kualitas

Sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah dapat dilihat dari dua aspek utama, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas memandang bagaimana ukuran atau jumlah penduduk (struktur, komposisi, kepadatan, *sex ratio*). Sementara kualitas memandang lebih dalam, bagaimana kemampuan penduduk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kualitas penduduk secara umum diukur dari tiga dimensi utama. Ketiga dimensi tersebut adalah tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Efek ketiga dimensi tersebut searah dengan kualitas penduduk. Semakin tinggi capaian ketiga indikator tersebut, semakin tinggi capaian kualitas penduduk, demikian sebaliknya.

Beberapa referensi secara eksplisit juga menyebutkan bahwa akselerasi pembangunan hanya akan terjadi jika terjadi peningkatan kualitas SDM. Dalam konsep ekonomi makro, di antara beberapa faktor produksi, kualitas SDM merupakan satu-satunya faktor yang dapat diharapkan. Mengapa? Karena SDM erat hubungannya dengan sesuatu yang “hidup” dan dapat dikelola seperti ide, pikiran, inovasi, dan adaptasi.

Dalam konteks kependudukan, setiap pertumbuhan penduduk harus disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas salah satunya dipicu oleh kualitas SDM. Keseimbangan antara laju pertumbuhan kuantitas dan pertumbuhan kualitas penduduk adalah modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang optimal. Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Tabel 1.2 mendeskripsikan bahwa jumlah penduduk yang banyak tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi penduduknya.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Indikator Pembangunan di Sepuluh Provinsi Terbanyak di Indonesia, 2020

Provinsi	Jumlah (Juta) ¹	Kepadatan (Orang/km ²) ¹	<i>Sex Ratio</i> (Laki-laki Per 100 Perempuan) ¹	Rasio Ketergantungan ¹	Tingkat Pengangguran (%) ²	PDRB Per Kapita (Juta/Tahun) ²	Peringkat IPM ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa Barat	48.27	1.365	103.13	42.94	10.46	41.81	10
Jawa Timur	40.67	851	99.60	42.33	5.84	57.65	16
Jawa Tengah	36.52	1.113	101.15	43.16	6.48	38.60	14
Sumatera Utara	14.80	203	100.61	48.32	6.91	55.18	15
Banten	11.90	1.232	104.04	42.89	10.64	47.60	8
DKI Jakarta	10.56	15.907	102.06	39.73	10.95	260.44	1
Sulawesi Selatan	9.07	194	98.59	45.84	6.31	56.51	13
Lampung	9.01	260	105.14	45.87	4.67	41.62	25
Sumatera Selatan	8.47	92	104.16	47.09	5.51	53.51	24
Riau	6.39	73	105.11	46.24	6.32	102.29	7

Sumber Tabel : ¹Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), ²BPS, Diolah

C. Penduduk dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Sebaran penduduk di Provinsi Lampung tidak merata. Pemicunya tentu kondisi *geographical space* dan kemajuan wilayah yang mampu mendorong dan menarik penduduk untuk berdifusi keluar-masuk. Berdasarkan hasil SP2020, Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan distribusi penduduk tertinggi, yaitu sebesar 16,21 persen, disusul Kota Bandar Lampung sebesar 12,94 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar 12,33 persen, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 11,82 persen. Sementara tiga Kabupaten dengan distribusi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,81 persen, Kota Metro sebesar 1,87 persen, dan Kabupaten Mesuji sebesar 2,53 persen.

Adanya sebaran penduduk yang tidak merata mengindikasikan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung belum merata. Individu secara alamiah akan mendekati diri dengan wilayah yang memiliki intensitas dan kegiatan ekonomi yang tinggi. Tujuannya satu, yaitu memudahkan akses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ada gula maka ada semut. Meski demikian, kondisi geografis wilayah juga perlu menjadi pelengkap analisis mengapa sebaran penduduk tidak merata.

Pada tahun 2010, 2015, hingga 2020, secara umum proporsi distribusi penduduk masing-masing kabupaten/kota tidak berubah. Namun apabila kita perhatikan besaran distribusinya, sebanyak 10 kabupaten/kota (mayoritas) cenderung mengalami penurunan terutama pada Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Lima kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan (lihat Tabel 3). Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk juga mengalami pergeseran di Provinsi Lampung.

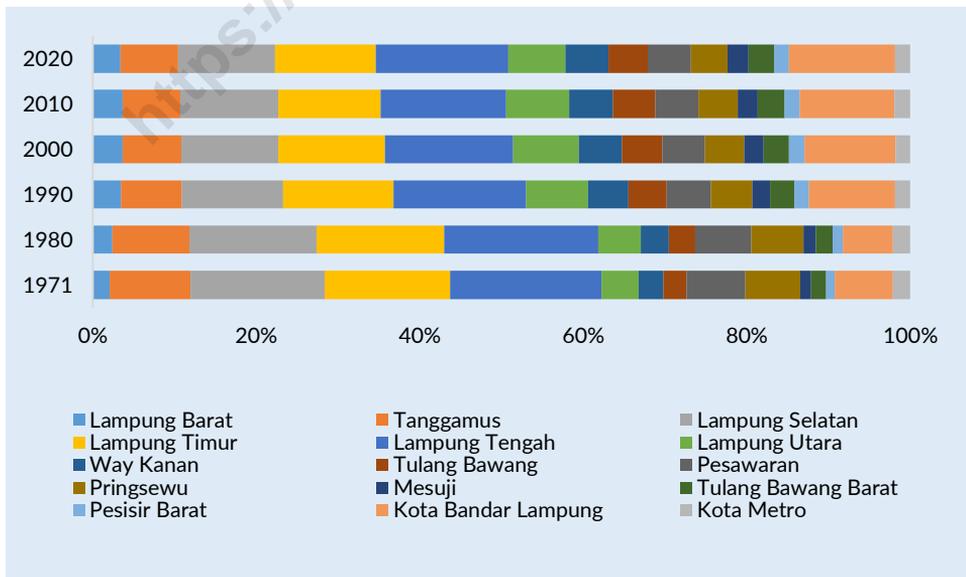
Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan limpahan penduduk terbesar sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2010, distribusi penduduk Kota Bandar Lampung 11,59 persen. Pada tahun 2015 menjadi 12,06 persen dan pada tahun 2020 mencapai 12,94 persen. Penyebabnya diperkirakan karena Kota Bandar Lampung merupakan pusat segala aktivitas dan gravitasi ekonomi sehingga turut memicu mobilitas penduduk di Provinsi Lampung.

Lebih jauh, apabila kita perhatikan hasil Sensus Penduduk 1971 sampai dengan Sensus Penduduk 2020, pergeseran sebaran penduduk antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung secara berangsur telah terjadi. Gambar 1.3 merupakan hasil pengolahan Sensus Penduduk 1971 sampai dengan Sensus Penduduk 2020. Pada Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990, di Provinsi Lampung hanya ada 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.3. Distribusi Penduduk dan Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/ Kota	Distribusi Penduduk (%) ¹			Kontribusi PDRB (%) ²		
	2010	2015	2020	2010	2015	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	3.64	3.61	3.35	3.28	2.03	1.98
Tanggamus	7.05	7.07	7.11	4.29	4.41	4.31
Lampung Selatan	11.99	11.98	11.82	12.31	12.44	12.35
Lampung Timur	12.51	12.43	12.33	12.95	12.13	11.35
Lampung Tengah	15.39	15.27	16.21	19.34	19.35	19.82
Lampung Utara	7.68	7.47	7.03	6.76	6.67	6.63
Way Kanan	5.34	5.33	5.26	4.00	3.98	3.90
Tulang Bawang	5.23	5.29	4.77	6.49	6.41	6.44
Pesawaran	5.24	5.25	5.30	4.73	4.64	4.52
Pringsewu	4.80	4.77	4.50	3.15	3.18	3.11
Mesuji	2.46	2.41	2.53	2.90	2.90	2.90
Tulang Bawang Barat	3.30	3.26	3.18	3.22	3.22	3.19
Pesisir Barat	1.86	1.85	1.81	0.00	1.28	1.31
Kota Bandar Lampung	11.59	12.06	12.94	14.88	15.61	16.42
Kota Metro	1.91	1.95	1.87	1.69	1.76	1.75
Lampung	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber Tabel : ¹Hasil Sensus Penduduk, ²BPS Provinsi Lampung, Diolah



Gambar 1.3. Perkembangan Kontribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Lampung (Persen), 1971–2020

D. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

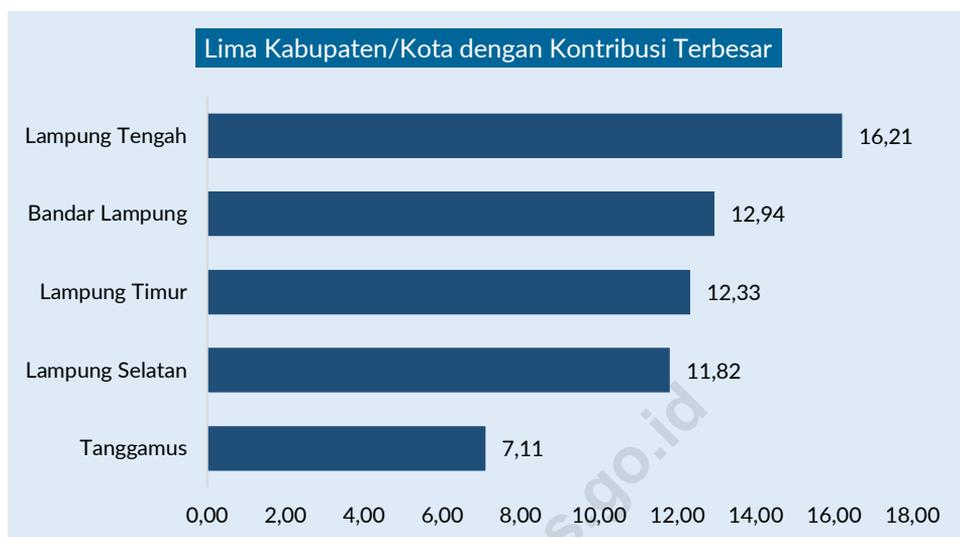
Sebaran atau distribusi penduduk mendeskripsikan sebaran penduduk di suatu wilayah, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² pada suatu wilayah. Wilayah dengan distribusi penduduk yang besar tidak berkorelasi positif dengan tingkat kepadatan yang besar.

Pada Sensus Penduduk 1971–1990, jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung hanya ada 4, yaitu Kabupaten Lampung Tengah (ditetapkan tahun 1945), Kabupaten Lampung Selatan (ditetapkan tahun 1956), Kabupaten Lampung Utara (ditetapkan tahun 1965), dan Kota Bandar Lampung (ditetapkan tahun 1983). Kini, Kabupaten Lampung Tengah mekar menjadi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur (1999) dan Kota Metro (1999). Kabupaten Lampung Selatan mekar menjadi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus (1997), Kabupaten Pesawaran (2007), dan Kabupaten Pringsewu (2008). Kabupaten Lampung Utara mekar menjadi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat (1991), Kabupaten Tulang Bawang (1997), Kabupaten Way Kanan (1999), Kabupaten Mesuji (2008), Kabupaten Tulang Bawang Barat (2009), dan Kabupaten Pesisir Barat (2013). Sedangkan untuk Kota Bandar Lampung hingga saat tidak mengalami pemekaran.

Tabel 1.4. Sejarah Pembentukan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

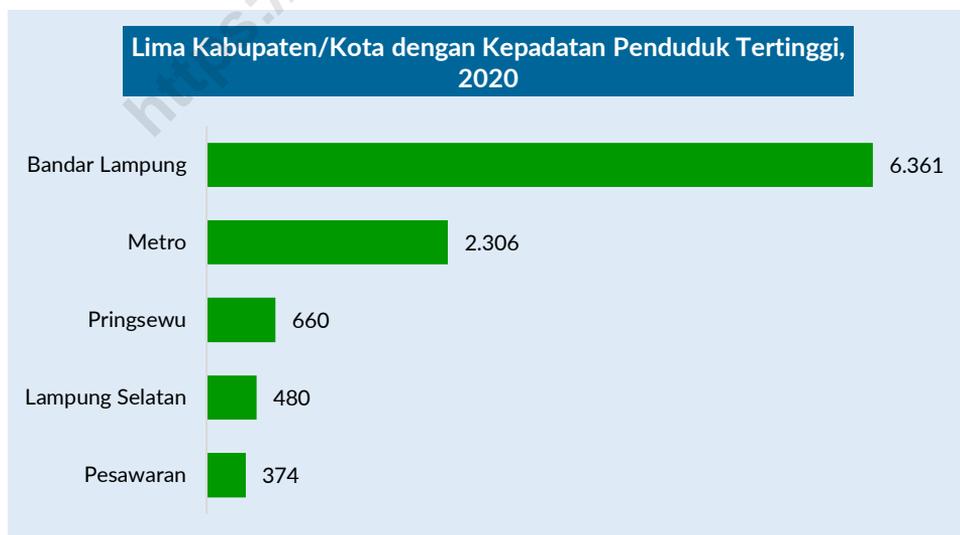
Tahun (1)	Kabupaten/Kota (2)	Tahun (1)	Kebupaten/Kota (2)
1945	Lampung Tengah	1965	Lampung Utara
1999	Lampung Tengah	1991	Lampung Utara
	Lampung Timur		Lampung Barat
	Kota Metro	1997	Lampung Utara
			Tulang Bawang
1956	Lampung Selatan	1999	Lampung Utara
1997	Lampung Selatan		Way Kanan
	Tanggamus	2008	Tulang Bawang
2007	Lampung Selatan		Mesuji
	Pesawaran	2009	Tulang Bawang
2008	Tanggamus		Tulang Bawang Barat
	Pringsewu	2013	Lampung Barat
			Pesisir Barat
		1983	Kota Bandar Lampung

Sumber Tabel : BPS Provinsi Lampung, Diolah



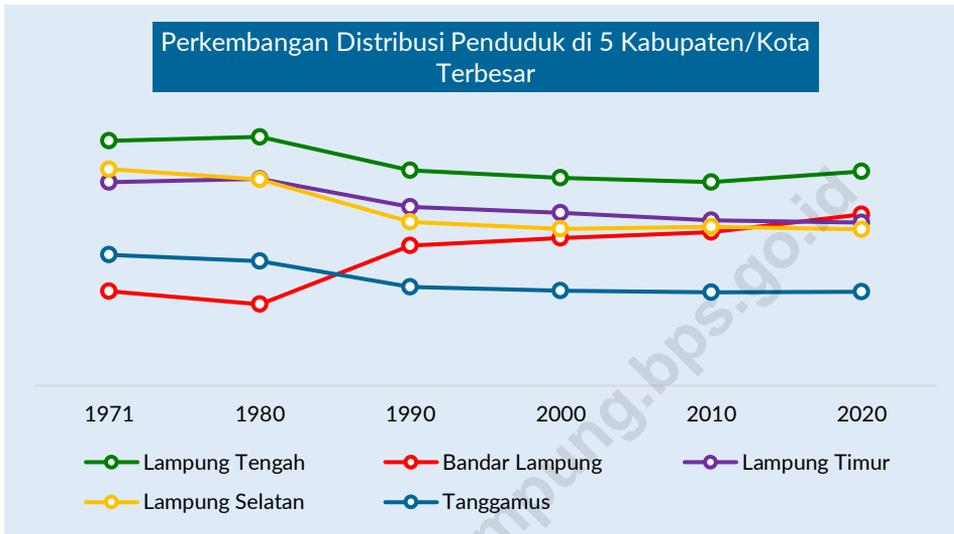
Gambar 1.4. Lima Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Kontribusinya (Persen), 2020

Gambar 1.4 di atas menggambarkan lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki sebaran penduduk terbesar berdasarkan SP2020. Secara umum, masih didominasi kabupaten/kota induk (Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung).



Gambar 1.5. Lima Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi, 2020

Gambar 1.5 mendeskripsikan lima kabupaten/kota terdapat di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 6.361 penduduk/km². Kedua adalah Kota Metro dengan tingkat kepadatan mencapai 2.306 penduduk/km², disusul Kabupaten Pringsewu sebesar 660 penduduk/km², Kabupaten Lampung Selatan sebesar 480 penduduk/km², dan Kabupaten Pesawaran sebesar 374 penduduk/km².



Gambar 1.6. Perkembangan Distribusi Penduduk di Lima Kabupaten/Kota Terbesar Hasil SP2020 (Persen), 1971-2020

Perkembangan distribusi penduduk di 5 kabupaten/kota terbesar hasil SP2020 di Provinsi Lampung tersaji pada Gambar 1.6 di atas. Dari kelima kabupaten/kota di atas, 4 kabupaten cenderung memiliki pola penurunan distribusi. Hanya Kota Bandar Lampung yang polanya menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung masih menjadi wilayah daya tarik pergeseran penduduk di Provinsi Lampung.

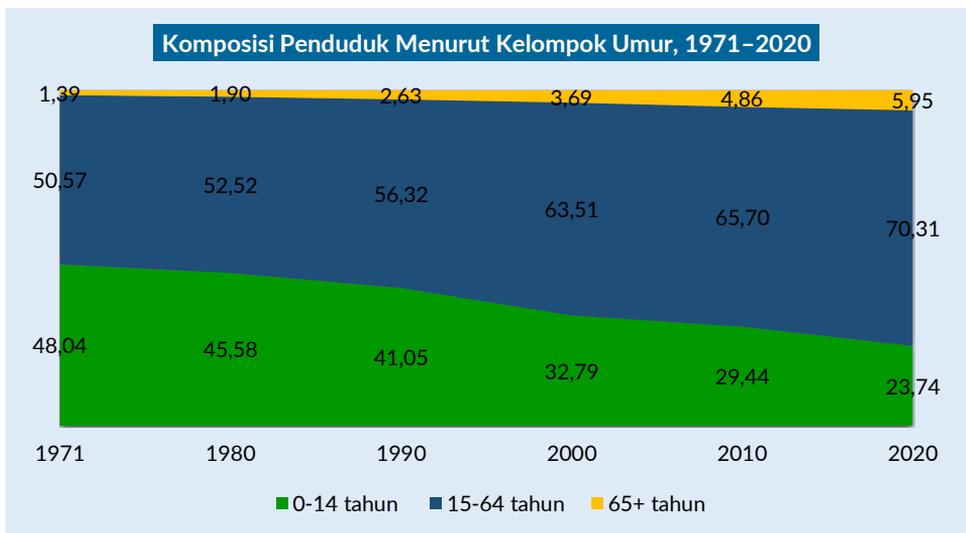
Distribusi penduduk Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 1971-2020 berubah dari 18,50 persen menjadi 16,21 persen (menurun sebesar 2,29 persen). Pada periode yang sama, Kabupaten Lampung Timur berubah dari 15,37 persen menjadi 12,33 persen (menurun sebesar 3,05 persen). Kabupaten Lampung Selatan berubah dari 16,37 persen menjadi 11,82 persen (menurun 4,55 persen), dan Kabupaten Tanggamus berubah dari 9,88 persen menjadi 7,11 persen (menurun 2,78 persen). Sementara untuk Kota Bandar Lampung berubah dari 7,15 persen menjadi 12,94 persen (meningkat 5,80 persen).

E. Perubahan Struktur Penduduk di Provinsi Lampung

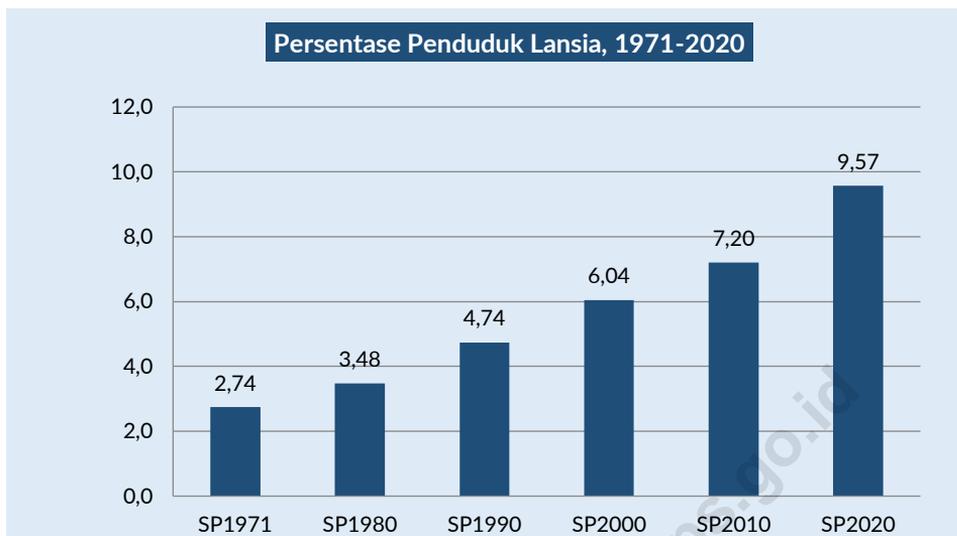
Seiring dengan peristiwa menurunnya tingkat kelahiran sejak tahun 70-an, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) di Provinsi Lampung terus menurun. Pada tahun 1971, persentase penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai 48,04 persen. Periode selanjutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 1980 persentasenya mencapai 45,58 persen, tahun 1990 mencapai 41,05 persen, tahun 2000 mencapai 32,79 persen, tahun 2010 mencapai 29,44 persen, dan tahun 2020 mencapai 23,74 persen.

Sementara itu, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 50,57 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,31 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Lampung masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,31 persen penduduknya masih berada di usia produktif (Gambar 1.7).

Pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Konsekuensi dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Persentase penduduk lansia Provinsi Lampung meningkat menjadi 9,57 persen di tahun 2020 dari 7,20 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP2010. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Lampung akan berada dalam masa transisi menuju era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen ke atas (Gambar 1.8).



Gambar 1.7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 1971–2020



Gambar 1.8. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 1971–2020

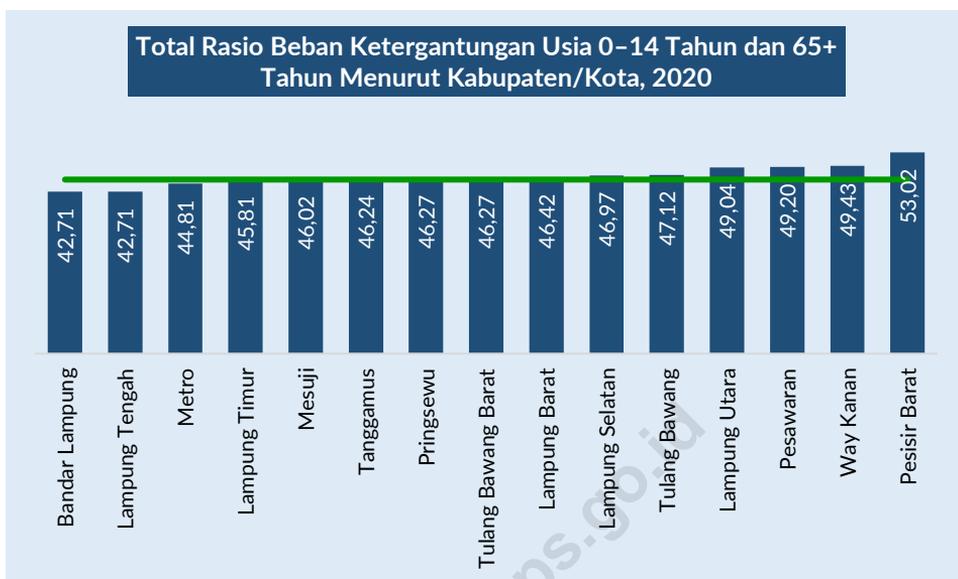
Tabel 1.5. Angka Rasio Ketergantungan Provinsi Lampung, 1971–2020

Rasio Ketergantungan	1971	1980	1990	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Usia 0–14 tahun	95.00	86.78	72.88	51.63	44.80	37.08
Usia 65+ tahun	2.74	3.64	4.67	5.82	7.40	8.79
Usia 0–14 tahun dan 65+ tahun	97.74	90.42	77.55	57.45	52.20	45.87

Sumber : SP Diolah, BPS Provinsi Lampung

Rasio ketergantungan di Provinsi Lampung masih sangat didominasi rasio ketergantungan penduduk muda (0–14 tahun) meskipun trennya selama 60 tahun terakhir (1971–2020) terus mengalami penurunan seiring dengan penambahan penduduk.

Sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih memiliki rasio beban ketergantungan yang lebih tinggi dari angka provinsi (11 kabupaten/kota). Bahkan, Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio beban ketergantungan di atas 50 (Gambar 1.9). Rasio beban ketergantungan Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 45,87. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Lampung tengah menikmati bonus demografi. Menurut United Nations Population Fund, bonus demografi terjadi manakala jumlah usia produktif (15–64 tahun) lebih banyak dari pada usia non produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun).



Gambar 1.9. Total Rasio Beban Ketergantungan Usia 0-14 Tahun dan 65+ Tahun Menurut Kabupaten/Kota, 2020

F. Implikasi Perubahan Struktur Penduduk di Masa Depan

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura saat ini tengah mengalami perubahan struktur penduduk, yaitu penuaan penduduk (*ageing population*). Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami *ageing population* mulai tahun 2040.

Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk. Pada fase ini, masalah kependudukan dapat hadir apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang *ageing population* antara lain penataan sistem pensiun dan perbaikan layanan kesehatan ketika penduduk memasuki usia lansia. Ini artinya, risiko terbesar pada fase penuaan penduduk adalah risiko fiskal. Jika tidak ada sistem yang diubah maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Bagaimana dengan Provinsi Lampung? Dalam publikasi BPS berjudul Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, pada tahun 2040, Provinsi Lampung diproyeksikan akan memiliki 1,23 juta penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas), atau mencapai 13,53 persen lebih dari jumlah populasi. Kondisi ini harus diantisipasi

mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian regional, nasional, dan global.



Gambar 1.10. Piramida Penduduk Provinsi Lampung, 1990-2040

Penuaan populasi dan perlambatan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan stagnasi ekonomi, kapasitas fisik, preferensi, dan kebutuhan individu akan berubah seiring dengan bertambahnya usia mereka (Lisenkov, dkk., 2012). Meski begitu, Prettner (2012) mengklaim bahwa ada interaksi positif antara penuaan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Prettner (2012), individu yang lebih tua cenderung menabung lebih banyak. Peningkatan umur panjang akan secara positif

memengaruhi investasi, khususnya di R&D, yang umumnya diakui sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Aghion dan Howitt, 1992 dalam Nagarajan, 2014).

Selain *ageing population*, kondisi lain yang dapat “diterima” pada perubahan struktur penduduk adalah bonus demografi. Menurut Bloom dan Williamson (1998) dan Lee dan Mason (2007), bonus demografi dapat mendorong pembangunan ekonomi. Bonus demografi bisa menjadi beban pemerintah bila negara tidak mampu mengoptimalkannya. Lalu bagaimana pemerintah semestinya menyambut bonus ini terutama jika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, peluang atau tantangan?

Studi yang dilakukan Misra (2015) pada negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) dan Uni Eropa dalam *Impact of Demographic Dividend on Economic Growth: A Study of BRICS and the EU* menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi berhubungan secara positif. Menurut Nugraha (2016) dalam *The Impact of Human Capital Density on Per Capita Income Convergence of Regencies/Cities in Indonesia*, jumlah penduduk yang besar tidak menjadi masalah ketika modal manusia yang dimiliki wilayah memiliki level yang tinggi.

Untuk menghadapi bonus demografi beberapa langkah strategis harus segera diambil pemerintah. Pertama, sebagai kebutuhan fundamental, penguatan pendidikan secara formal harus terus didorong, bukan semata wajib belajar 9 tahun tetapi mendorong agar siswa mau belajar sepanjang hayatnya. Mengapa? Karena pendidikan adalah dasar segalanya, modal utama dalam kompetisi global. Oleh sebab itu pemerataan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, dan program bantuan seperti beasiswa harus menjadi prioritas pemerintah.

Kedua, mendorong dan meningkatkan program pelatihan vokasi atau program berbasis keterampilan dan kompetensi baik melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun media-media lain seperti magang dan merangsang kewirausahaan (*enterpreunership*). Tujuannya agar penduduk usia kerja siap masuk ke pasar kerja. Di samping penguatan *skill* pada tingkat tenaga kerja, hal terpenting lainnya adalah pembukaan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan tercipta karena adanya lowongan pekerjaan baik dengan cara mendatangkan investor atau kemudahan berwirausaha.

Dukungan sarana dan prasarana juga tidak kalah penting. Sarana dan prasarana yang memadai memancing orang untuk datang berinvestasi dan memudahkan tenaga kerja dalam mengakses pekerjaan.

Terakhir penguatan program *research and development* (R&D) melalui alokasi pembiayaan yang memadai baik di tingkat pemerintah maupun swasta yang lebih intensif. Bonus demografi yang tengah hadir di tengah-tengah kita semestinya dapat kita optimalkan sedemikian rupa. Siklus kehadirannya tidak reguler (secara teori sangat bergantung total fertility rate (TFR) dan migran usia produktif). Bonus demografi setidaknya dapat memengaruhi penyediaan tenaga kerja (*labor supply*), jumlah tabungan (*savings*), penguatan modal manusia (*human capital*), dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

G. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan meskipun pertumbuhannya cenderung melambat dari waktu ke waktu.
2. Sebaran penduduk antarwilayah kabupaten/kota masih tidak seimbang.
3. Provinsi Lampung diperkirakan akan mengalami penuaan penduduk setelah tahun 2036.
4. Kabupaten Pesisir Barat hingga tahun 2020 belum mengalami bonus demografi.
5. Untuk dapat menuai bonus demografi secara optimal, maka berbagai kebijakan perlu diimplementasikan pada tiga kategori penduduk, yaitu pada usia anak, usia produktif, dan lansia.
6. Pada bahasan berikutnya akan dibahas ketiga kategori penduduk dengan segala tantangan dan peluang dalam proses pembangunannya.
7. Aspek yang perlu diteliti pada setiap tahapan bervariasi, mulai dari aspek gizi dan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial bagi lansia.
8. Perbandingan kondisi anak, usia produktif, dan lansia antarwilayah juga sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S. M., 2020. Bonus Demografi dan Jendela Peluang Meletakkan Dasar Pembangunan Manusia. In: S. M. Adioetomo & E. L. Pardede, eds. *Memetik Bonus Demografi*. Depok: Rajawali Press, pp. 23–36.
- Adioetomo, S. M. & Mujahid G., 2014. *UNFPA Indonesia Monograph Series: No. 1 Indonesia on the Treshhold of Population Ageing*. Jakarta: UNFPA Indonesia.
- Barthos, B., 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bloom, E. D. a. W. G. J., 1998. Demographic Transition and Economic. *The World Bank Economic Review*, Volume 12, pp. 419–455.
- BPS, 2012. *Analisis Statistik Sosial, Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: BPS.
- BPS, 2014. Badan Pusat Statistik. [Online]
Avalaible at: <https://www.bps.go.id/news/2014/03/26/85/proyeksi-penduduk-mercusuar-pembangunan-negara.html>
[Accessed 6 September 2021]
- BPS, 2018. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-20145 Hasil SUPAS 2015*. 1 ed. Jakarta: BPS.
- BPS, 2020. Badan Pusat Statistik. [Online]
Avalaible at: <https://www.bps.go.id/statisticable/2009/02/20/1267/jumlah-penduduk-hasil-sensus-penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-provinsi-1971---2015.html>
[Accessed 30 Agustus 2021]
- BPS, 2020. Badan Pusat Statistik. [Online]
Avalaible at: <https://www.bps.go.id/indicator/52/286/2/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto.html>
[Accessed 9 Agustus 2021]
- BPS, 2021. *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*. 1 ed. Jakarta: BPS.
- BPS, 2021. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia*. 1 ed. Jakarta: BPS.
- Fitch Ratings, 2020. *Fitch Ratings*. [Online]
Avalaible at: <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-unemployment-cases-from-coronavirus-hit-08-11-2020>
[Accessed 31 Agustus 2021]
- Kogel, T., 2005. Youth Dependency and Total Factor Productivity. *Journal of Development Economics*, 76(1), pp. 147-173.
- Lee, S. M. A., 2007. Who Gains from the Demographic Dividend? *International Journal Forecast*, Volume 23, pp. 609-619.
- Mason, A., Lee, R., M. & Lee S. H., 2017. *Support Ratios and Demographic Dividends: Estimates for the World*, New York: United Nations.
- Minh, O. D., 2012. Population and Economic Growth in Developing Countries. *emic Research in Business and Social Sciences*,



2

Profil Anak

- A. Anak dalam Bonus Demografi Lampung
- B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak
- C. Pendidikan Anak
- D. Kesehatan Anak
- E. Pekerja Anak
- F. Perkawinan Anak
- G. Kesimpulan



Anak-anak Indonesia khususnya di Provinsi Lampung saat ini akan menjadi tumpuan bangsa di era puncak demografi dan dalam menghadapi era penuaan populasi di masa mendatang.

Anak Investasi Masa Depan

Perwujudan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak agar bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa, karena itu pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Kondisi tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak dan juga masa depan bangsa.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target dari program *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030. Salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia. Target yang ingin dicapai diantaranya adalah penghapusan kemiskinan anak; tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati; menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak; memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini; dan target lainnya. Berbagai strategi untuk mencapai target tersebut telah disusun dengan baik serta berkesinambungan agar dapat diimplementasikan dengan tepat demi kesejahteraan anak-anak Indonesia.

A. Anak dalam Bonus Demografi Lampung

Anak-anak Indonesia khususnya di Provinsi Lampung saat ini akan menjadi tumpuan bangsa di era puncak demografi dan dalam menghadapi era penuaan populasi di masa mendatang. Oleh karena itu, anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pada masa bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif (15 hingga 64 tahun) jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+).

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dengan kemunculan masa Bonus Demografi yakni jumlah pengangguran berkurang, meningkatnya daya saing bangsa, membentuk generasi emas yang kreatif dan inovatif, pertumbuhan ekonomi lebih baik, meringankan beban hidup, SDM semakin produktif dan berkualitas, dan peluang Indonesia menjadi negara maju semakin terbuka lebar.

Jika dilihat dalam lingkup pulau Sumatra, Provinsi Lampung memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu mencapai 4,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada di Lampung sudah cukup baik. Karena semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, atau dengan kata lain semakin banyak yang menganggur.



Gambar 2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatra (Persen), Agustus 2020

Sedangkan tantangan yang ditimbulkan dari kehadirannya Bonus Demografi yakni masih tingginya tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah, daya saing tenaga kerja yang relatif rendah (pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi ke 40 dari 63 negara dalam IMD *World Competitiveness*), pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan kerja, dan masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi penduduk yang tamat SD dan SMP, yaitu mencapai 52,86 persen. Bahkan 10,57 persen penduduk yang bekerja tidak pernah mengesampingkan pendidikan. Hanya kurang dari 10 persen pekerja yang pernah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan pemerintah khususnya Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak sekarang dalam upaya memaksimalkan peranan pada era bonus demografi mendatang.



Gambar 2.2. Penduduk 15 tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, 2020

Setelah melalui masa bonus demografi, suatu negara akan memasuki era *aging population*, dimana terjadi peningkatan proporsi penduduk usia tua dari total penduduk suatu negara. Di Indonesia era bonus demografi diperkirakan hanya mencapai tahun 2035, hanya kurang dari 15 tahun lagi.



Gambar 2.3. Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur, 2013-2020

Dimulainya penuaan populasi tercermin dari meningkatnya proporsi angkatan kerja dengan usia diatas 40 tahun. Jika dilihat dari gambar dibawah, proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas di Provinsi Lampung terjadi peningkatan selama kurun waktu 2013-2020. Pada tahun 2013, proporsi angkatan kerja usia 40 tahun keatas mencapai 42,28 persen. Setelah 7 tahun berjalan, proporsi

angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 49,60 persen. Sedangkan proporsi angkatan kerja usia 20-39 tahun terjadi penurunan dari 50,69 persen menjadi 45,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah mulai memasuki *aging population*.

B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana *Dependency Ratio* mencapai titik terendah (Adioetomo & Pardede, 2018).

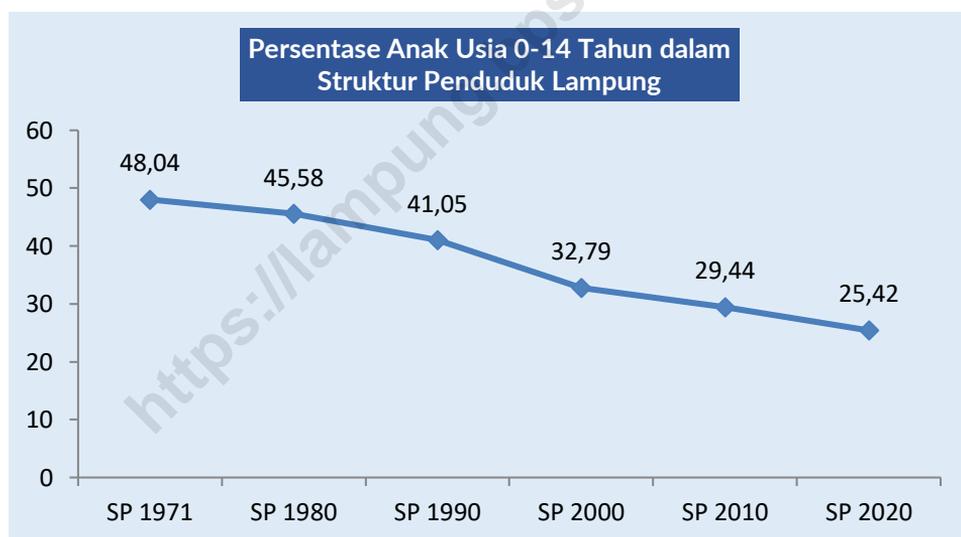
Ada berbagai konsep definisi anak yang berkembang di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari bagan dibawah ini. Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan anak sendiri dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu anak usia dini 2-5 tahun (Perpres No. 60 tahun 2013), anak usia sekolah 6-12 tahun (Santrock, 2008), anak remaja 10-24 tahun (BKKBN & WHO) dan pemuda 16-30 tahun (UU Kepemudaan).

Karena keterbatasan data Sensus Penduduk 2020, konsep batasan usia anak yang digunakan dalam penulisan publikasi ini dimulai dari anak yang masih bayi (penduduk berumur dibawah 1 tahun) hingga berusia 14 tahun (*young age group*).



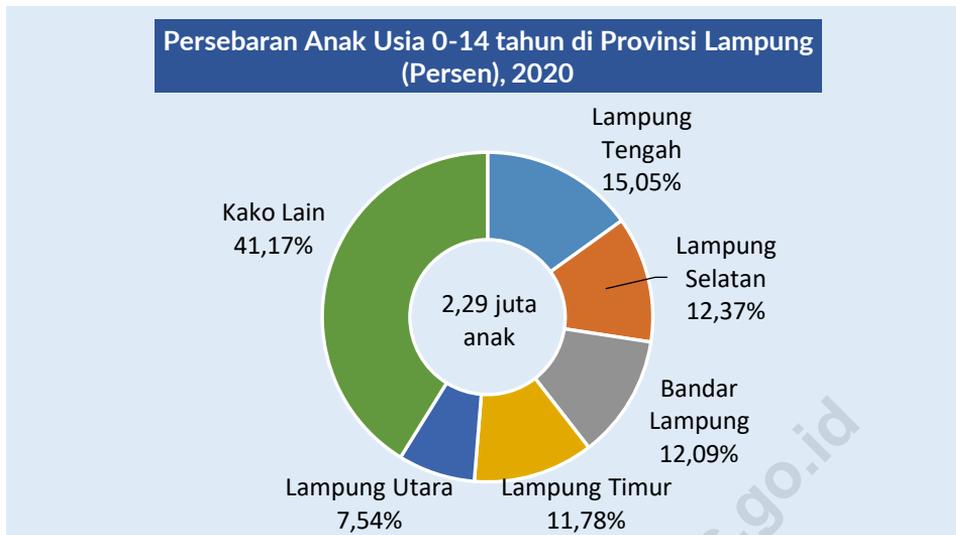
Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan yang serasi antara kualitas dan kuantitas, perlu pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (*child development*). Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Perkembangan penduduk anak di Provinsi Lampung dapat diketahui dari grafik di bawah ini. Dalam kurun waktu 50 tahun, dimulai dari adanya Sensus Penduduk 1971, persentase penduduk usia anak hampir separuh jumlah penduduk Provinsi Lampung, yaitu mencapai 48,04 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pada saat itu angka kelahiran masih sangat tinggi. Hingga hasil Sensus Penduduk 2020, persentase penduduk usia anak berkurang hampir setengahnya menjadi 25,42 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB).



Gambar 2.4. Persentase Anak Usia 0-14 Tahun dalam Struktur Penduduk Lampung

Program KB termasuk cara untuk menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). TFR dapat diartikan sebagai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). TFR Lampung tahun 2020 mencapai 2,24, yang artinya wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia subur. Masih sedikit lebih tinggi dari target SDGs Indonesia yaitu menurunkan TFR hingga 2,1.



Gambar 2.5. Persebaran Anak Usia 0-14 tahun di Provinsi Lampung (Persen), 2020

Jika dilihat dari sebaran penduduk anak di Lampung yang berjumlah 2,29 juta anak, Kabupaten Lampung Tengah memiliki persentase paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai 15,05 persen atau mencapai 244 ribu anak. Tidak heran karena kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di Lampung berdasarkan SP2020, yaitu mencapai 1,46 juta jiwa atau sekitar 16,21 persen dari total penduduk Lampung.



Gambar 2.6. Persebaran Anak Usia 0-14 tahun menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung (Persen), 2020

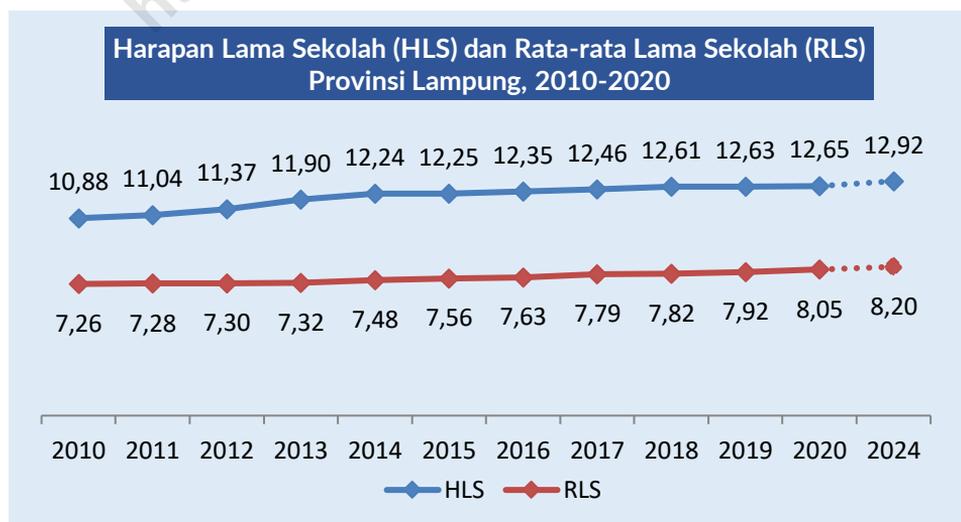
Penduduk anak laki-laki masih lebih besar proporsinya dibandingkan penduduk anak perempuan. Berdasarkan hasil SP2020, jumlah penduduk anak laki-laki mencapai 1,17 juta anak (51,29 persen) sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,12 juta anak (48,71 persen). Hal ini tidak jauh berbeda dengan sex ratio penduduk Lampung yang mencapai 105,14, yang berarti terdapat 105 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

C. Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang krusial untuk kesejahteraan manusia. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan karena pendidikan berfungsi untuk membentuk pemahaman terhadap sesuatu dan membuat manusia menjadi lebih kritis dalam berpikir. Pembangunan pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berkualitas unggul.

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu, bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Komitmen Indonesia untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan terlihat dengan menetapkan wajib belajar hingga 12 tahun dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa anak yang telah berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara gratis.



Gambar 2.7. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Lampung, 2010-2020

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, dapat digunakan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu sedangkan RLS dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Jika dilihat berdasarkan Gambar 2.7, perkembangan HLS dan RLS Provinsi Lampung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan HLS pada periode 2010-2020 mencapai 1,53 per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan RLS mencapai 1,05 per tahun. Pada tahun 2020, HLS Provinsi Lampung mencapai 12,65 atau bisa dikatakan rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,65 tahun atau setara dengan Diploma I. Sedangkan RLS Lampung pada tahun 2020 telah mencapai 8,05 atau secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,05 tahun atau telah menamatkan kelas VIII/kelas 2 SMP.

RPJMD Provinsi Lampung 2020-2024 menargetkan capaian HLS dan RLS di tahun 2024 masing-masing sebesar 12,92 dan 8,20. Hal ini cukup berat sehingga dibutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target tersebut. Cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk yang telah berusia lanjut. Akan tetapi, mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Sedangkan program sosialisasi pendidikan yang terdiri dari sosialisasi minat belajar di PAUD, sosialisasi wajib belajar 12 tahun, pengadaan taman baca, dan kegiatan bimbingan belajar sangat diperlukan untuk mencapai target harapan lama sekolah.



Gambar 2.8. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sekolah di Provinsi Lampung, 2018

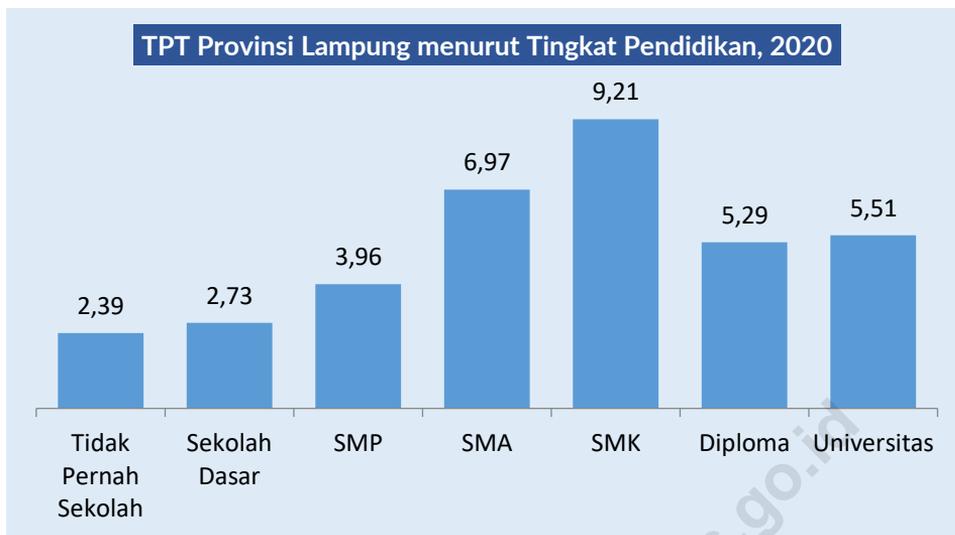
Untuk mencapai target pemerintah di bidang pendidikan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukungnya. Salah satunya adalah ketersediaan sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 2018, berbagai tingkatan sekolah terdapat di Provinsi Lampung. Terdapat lebih dari 4.000 PAUD/TK/ sederajat tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung, lebih dari 2.500 SD/MI, hampir 1.400 sekolah menengah pertama, seribu lebih SMA/MA/SMK, 70 Akademi/Perguruan tinggi, bahkan ada 810 pondok pesantren. Dengan tersebarnya sekolah-sekolah hingga mencapai wilayah perdesaan dan terpencil diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*). Hal ini sangat diperlukan mengingat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia yang terjadi sejak awal Maret tahun 2020. Sejumlah tindakan pencegahan diinstruksikan kepada sekolah maupun perguruan tinggi untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan. Termasuk diantaranya meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), mencuci tangan pakai sabun (CTPS), serta menjaga jarak khususnya untuk sekolah yang berada di wilayah dengan tingkat resiko penyebaran virus COVID-19 yang tinggi.

Selain itu kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan berdasarkan nilai rapor, serta dibatalkannya Ujian Nasional (UN) tahun 2020 sehingga keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Pendidikan memang sangat penting bagi kemajuan generasi penerus bangsa, namun faktor kesehatan juga tetap harus diutamakan demi keberlangsungan masa depan bangsa.

Perkembangan teknologi di masa pandemi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan peserta didik agar dapat berkompetisi dalam dunia kerja. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi menganggur akibat tidak kompeten dalam dunia kerja yang di bidangnya. Tidak hanya teori yang dibutuhkan dalam dunia kerja, akan tetapi skill dan kemampuan teknologi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan karir.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Lampung menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan terdapat pada jenjang pendidikan SMK, yaitu mencapai 9,21 persen. Diikuti lulusan SMA dengan TPT sebesar 6,97 persen. Pengangguran yang cukup tinggi juga dialami oleh lulusan diploma dan perguruan tinggi, yaitu berkisar 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar persaingan dalam dunia kerja.



Gambar 2.9. TPT Provinsi Lampung menurut Tingkat Pendidikan, 2020

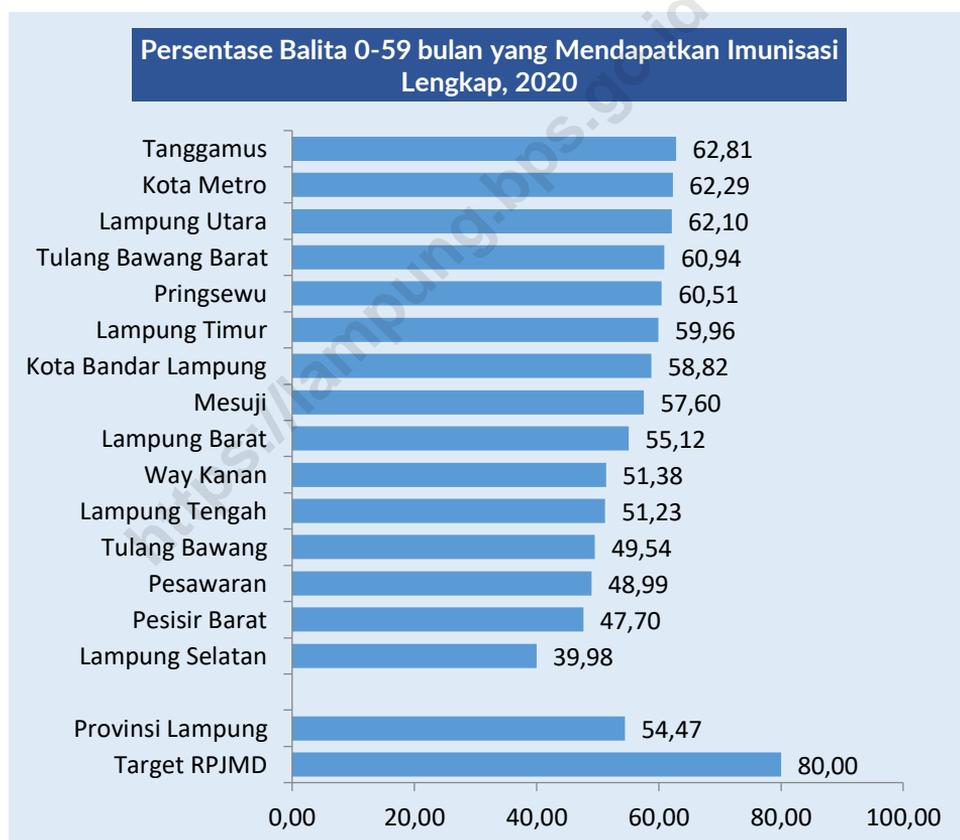
D. Kesehatan Anak

Seribu hari pertama kehidupan adalah periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Fase penghitungan seribu hari pertama dimulai dari masa kehamilan 270 hari hingga anak berusia 730 hari (2 tahun). Masa tersebut sangat penting mengingat masa itu merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan awal yang sangat menentukan masa depan anak di masa depan. Sayangnya, banyak orang tua yang belum banyak mengetahui terkait cara-cara memenuhi kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Orang tua di dalam sebuah keluarga sangat berperan penting dalam perkembangan anak. Keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak serta memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak, memberikan yang terbaik bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang optimal, mempunyai karakter dan arti hidup yang positif. Sehingga diperlukan pengetahuan mengenai cara memberikan stimulus kepada anak sesuai dengan usianya.

Imunisasi adalah proses di mana seseorang dibuat kebal atau kebal terhadap penyakit menular, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi orang tersebut dari infeksi atau penyakit berikutnya. Imunisasi adalah alat yang telah terbukti untuk mengendalikan dan memberantas penyakit menular yang mengancam jiwa dan diperkirakan dapat mencegah antara 2 dan 3 juta kematian setiap tahun. Ini adalah salah satu investasi kesehatan yang paling hemat biaya, dengan strategi yang telah terbukti membuatnya dapat diakses bahkan oleh populasi yang paling sulit dijangkau dan rentan. Imunisasi memiliki kelompok sasaran yang jelas; dapat disampaikan secara efektif melalui kegiatan penjangkauan; dan vaksinasi tidak memerlukan perubahan gaya hidup yang besar (WHO, 2020).

Imunisasi merupakan salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti: TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru (Tanjung et al., 2017). Vaksin dan penggunaan vaksin dapat memengaruhi perkembangan anatomi dan fisiologis progresif normal anak-anak dari bayi hingga dewasa. Program imunisasi dasar lengkap menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 wajib diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, yang terdiri dari Bacillus Calmette Guerin (BCG), diphtheria pertussis Tetanus-Hepatitis B-haemophilus influenzae tipe B (DPT-HB-HiB), hepatitis B pada bayi baru lahir, polio dan v.



Gambar 2.10. Persentase Balita 0-59 bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap, 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Lampung berada di angka 54,47 persen di tahun 2020. Sebanyak 9 kabupaten/kota cakupan IDL sudah diatas rata-rata angka Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Utara telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap di atas 60 persen. Namun masih ada kabupaten dengan cakupan imunisasi rendah, seperti Lampung Selatan yang

persentase balita mendapatkan IDL belum mencapai 40 persen. Meskipun begitu, banyaknya persentase balita yang mendapat IDL ini masih jauh dari target RPJMD Provinsi Lampung tahun 2024 yaitu mencapai 80 persen. Diperlukan kerja keras dari berbagai pihak supaya dapat mencapai target tersebut.

Tinggi rendahnya cakupan imunisasi dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, sikap petugas, lokasi imunisasi, kehadiran petugas, usia ibu, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga, kepercayaan terhadap dampak buruk pemberian imunisasi, status pekerjaan ibu, tradisi keluarga, dan dukungan keluarga (Tanjung 2017).

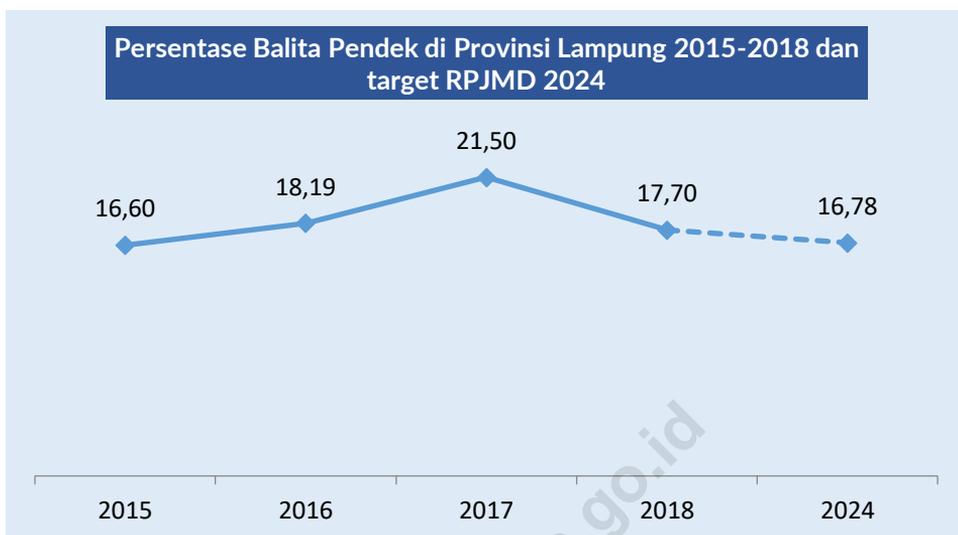
Faktor yang berperan dalam tumbuh kembang anak ada tiga, antara lain, genetik, nutrisi yang didapat dari ASI, MPASI serta makanan seimbang, dan faktor lingkungan meliputi pola pengasuhan, stimulasi, psikologis, kesehatan serta imunisasi. Berdasarkan rekomendasi WHO (2003), pemberian nutrisi pada anak bisa dilakukan saat lahir melalui Inisiasi Menyusu Dini (IMD), kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping ASI diberikan paling lambat 6 bulan sambil terus melanjutkan pemberian ASI.

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan alami pertama untuk bayi, menyediakan semua energi dan zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk enam bulan pertama kehidupannya, dan terus menyediakan hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak hingga tahun kedua kehidupan. ASI meningkatkan perkembangan sensorik dan kognitif, serta melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Pemberian ASI eksklusif mengurangi kematian bayi karena penyakit umum masa kanak-kanak seperti diare atau pneumonia, dan membantu pemulihan lebih cepat selama sakit (WHO, 2020).

ASI mengandung antibodi, hormon, faktor-faktor pertumbuhan, enzim, serta zat yang dapat membunuh bakteri dan virus (Hendrawati et al, 2005). Selain itu, ASI mengandung bermacam-macam zat anti infeksi baik yang seluler maupun yang humoral, sehingga mortalitas dan morbiditas neonates yang minum ASI lebih rendah daripada yang minum susu formula.

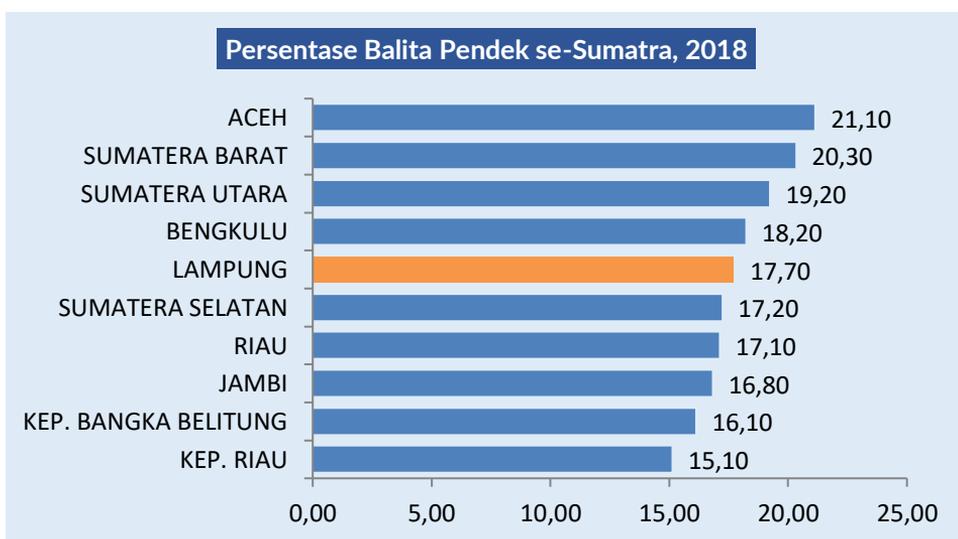
Penyerapan ASI/nutrisi yang buruk menyebabkan gangguan pertumbuhan, salah satunya adalah balita menjadi pendek (*stunting*). Selain penyerapan nutrisi yang kurang, penyebab gangguan pertumbuhan lainnya adalah faktor genetik, gangguan hormonal dan penyakit sistemik.

Perkembangan balita pendek (*stunting*) di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2018 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2015, persentase balita pendek mencapai 16,60 persen. Terus meningkat hingga tahun 2017 yang mencapai 21,50 persen. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 17,70 persen. Akan tetapi, ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam mencapai target RPJMD Provinsi Lampung tahun 2024, yaitu menurunkan persentase balita *stunting* hingga mencapai 16,78 persen.



Gambar 2.11. Persentase Balita Pendek di Provinsi Lampung 2015-2018 dan target RPJMD 2024

SDGs menargetkan untuk mengurangi angka stunting hingga 40 persen pada tahun 2030 dari persentase awal pada tahun 2012. Target untuk Indonesia sendiri adalah menurunkan angka stunting hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024. Upaya-upaya penurunan angka stunting terus dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan stunting sebagai fokus utama bidang kesehatan dan gizi. Kerja sama berbagai sektor juga dilakukan untuk mengatasi penyebab mendasar stunting yaitu kemiskinan, pendidikan, serta sarana prasarana kesehatan dan sanitasi. Dengan adanya kerjasama dari berbagai sektor diharapkan pencapaian target SDGs dapat segera terpenuhi sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia terutama anak-anak.



Gambar 2.12. Persentase Balita Pendek se-Sumatra, 2018

Berdasarkan data BPS, persentase balita pendek tertinggi se-Sumatra diperoleh provinsi Aceh, yaitu mencapai 21,10 persen. Diikuti provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara yaitu masing-masing mencapai 20,30 persen dan 19,20 persen. Sedangkan provinsi Lampung berada pada urutan ke-5 terbesar se-Sumatra. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase balita pendek terendah se-Sumatra, yaitu hanya mencapai 15,10 persen.

E. Pekerja Anak

Selain perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak, lingkup perlindungan anak juga mencakup perlindungan dari eksploitasi anak. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. Perlindungan terhadap pekerja usia anak harus diberikan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan perusahaan-perusahaan.

Internasional Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa pekerja usia anak dapat mengganggu masa kecil anak, menurunkan potensi anak, serta martabat anak, sehingga berbahaya bagi perkembangan fisik maupun mental anak (ILO 2015). Anak yang bekerja merupakan anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam dilakukan dalam jangka waktu pendek dan di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Sedangkan, pekerja anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya (Kemenaker RI, 2014).

ILO menentukan batas minimum anak diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak yang telah berusia 13-15 tahun dengan syarat bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh anak merupakan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Berdasarkan Gambar 2.13, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2018-2020. Pada tahun 2018, penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja sebanyak 2,55 persen. Menurun pada tahun 2019 menjadi 2,20 persen. Dan terjadi peningkatan penduduk yang bekerja pada tahun 2020 mencapai 4,01 persen.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam usaha pemenuhan nafkah rumah tangga. Dalam upaya untuk menurunkan jumlah anak yang bekerja, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan membentuk Program Aksi Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dengan salah satu kegiatannya adalah Penghapusan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Melalui Program Keluarga Harapan, pemerintah Indonesia mengembalikan pekerja anak untuk

kembali bersekolah dengan prioritas sarannya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).



Gambar 2.13. Persentase Anak Usia 10-17 tahun yang Bekerja di Provinsi Lampung, 2018-2020

Jika dilihat berdasarkan data Sakernas 2020, persentase tertinggi anak usia 10-17 tahun yang bekerja se-Sumatra terdapat di Provinsi Sumatra Utara, yaitu mencapai 6,39 persen. Sedangkan persentase anak yang bekerja di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Barat dan Lampung berkisar 4 persen. Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau memiliki persentase anak yang bekerja terkecil se-Sumatra yaitu sekitar 1 persen.



Gambar 2.14. Persentase Anak Usia 10-17 tahun yang Bekerja se-Sumatra, 2020

F. Perkawinan Anak

Perkawinan anak juga menjadi salah satu permasalahan yang mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam salah satu sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah pasca 2015 untuk menghapus perkawinan anak. Hal ini didukung oleh 116 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menyebutkan angka prevalensi perkawinan anak nasional mencapai 25,71 persen. Artinya, 25,17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, telah menikah sebelum usia 18 tahun. Praktik perkawinan anak banyak menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan dan anak-anak mereka.

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau kesatuan informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur di bawah 18 tahun. Perkawinan anak memengaruhi anak perempuan dan laki-laki, tetapi hal itu memengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional. Perkawinan anak sering kali karena paksaan dari orang tua dan dianggap sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Namun menurut Internasional Humanist and Ethical Union, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan child abuse (Humanist Internasional, 2009) karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak.



Gambar 2.15. Persentase Perempuan Usia 10 tahun keatas Menurut Usia Perkawinan Pertama dibawah 16 tahun dan 17-18 tahun, 2017-2020

Berdasarkan gambar diatas, persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertama untuk kedua golongan umur relatif berfluktuasi. Penduduk perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun lebih banyak dibandingkan dengan yang menikah pada usia 16 tahun ke bawah. Pada tahun 2020, penduduk yang menikah sekitar umur 17-18 tahun mencapai 21,59 persen sedangkan yang menikah di usia 16 tahun ke bawah mencapai 14,54 persen.

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Perkawinan bagi anak perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir (Unicef, 2019).

Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

G. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Lampung harus mempersiapkan anak sedini mungkin sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, utamanya untuk dapat memetik keuntungan dari bonus demografi dan upaya mitigasi dari penuaan populasi.
2. Penyebaran penduduk usia anak tidak merata dan merupakan cerminan dari penyebaran penduduk secara keseluruhan. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dalam upaya pemerataan penyebaran penduduk, mengingat SDM merupakan aset utama dalam pembangunan bangsa.
3. Pekerja anak dan perkawinan usia anak merupakan fenomena yang menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas anak Indonesia. Pandemi Covid-19 yang menjadi katalis meningkatnya kedua tantangan tersebut. Untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, pemerintah terus berupaya mengentaskan kedua tantangan tersebut dengan berbagai kebijakan.
4. Orang tua memegang peranan penting dalam memastikan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak, serta dalam membentuk karakter anak. Orangtua dan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dari seorang anak.
5. Perencanaan dan persiapan yang matang dalam dunia pendidikan, dukungan kesehatan, serta terpenuhinya hak anak akan membentuk generasi yang berdaya saing dan menjadi investasi yang tidak ternilai bagi Provinsi Lampung dan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S. M., Pardede, L. P. (2020). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini-Pembangunan Manusia: Pendekatan Daur Hidup Dalam Konteks Bonus Demografi, hal. 9, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, Jawa Barat.
- BPS, 2020a. Badan Pusat Statistik. [Online]
Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html> [Accessed 24 September 2021].
- BPS, 2020b. Badan Pusat Statistik. [Online]
Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/6/1179/1/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html> [Accessed 24 September 2021].
- BAPPENAS, BPS, UNICEF, PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>, diakses online 16 Juni 2021.
- Clark, Helen, dkk. (2020). A future for the world's children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission. The Lancet Commissions, Volume 395, ISSUE 10224, hal. 605-658, Published Online February 2020, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32540-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32540-1), diakses 23 Agustus 2021.
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta. (2009). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, hal 136-140. <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607/542>, diakses 25 Mei 2021.
- Pemerintah RI, 2020. LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024, Jakarta: Pemerintah RI.
- Worldbank, 2020. Worldbank2020 HCI: Country Briefs and Data. [Online]
Available at: <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital> [Accessed 24 September 2021].



3

Profil Usia Produktif

- A. Penduduk Usia Produktif: Motor Penggerak Agenda Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional
- B. Meretas Jalan Menuju Indonesia Emas (Tren Usia Produktif)
- C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan
- D. Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan
- E. Penduduk Usia Produktif Menurut Generasi
- F. Kesimpulan



Penduduk usia produktif khususnya yang berkualitas, baik dari sisi pendidikan, karakter, dan kompetensi memiliki peran penting dalam pemanfaatan bonus demografi dan meningkatkan pembangunan nasional dan daerah.

Profil Usia Produktif

Seperti dikemukakan pada bab awal, penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Menurut teori pertumbuhan model Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2014: 138). Dengan demikian, adanya perubahan pada faktor produksi, yang salah satunya adalah penduduk, akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selama sepuluh tahun terakhir (2010–2020), rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,62 persen di saat beberapa negara mengalami perlambatan akibat adanya krisis finansial. Akan tetapi, sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 66,45 persen pada tahun 2010 menjadi 69,28 persen pada tahun 2020. Peningkatan penduduk usia kerja tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, walaupun distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran di Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu antara 55,16 persen di tahun 2010 menjadi 57,66 persen di tahun 2020.

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 menduduki urutan kedelapan terbanyak di Indonesia atau kedua terbanyak di Sumatra. Akibat dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012, perekonomian Provinsi Lampung juga turut melambat hingga 2019 di tengah peningkatan penduduk usia kerja.

Setiap kelompok umur mempunyai perilaku yang berbeda dalam kegiatan ekonomi sehingga mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Modigliani (1986) menjelaskan teori siklus kehidupan (*life cycle hypothesis*) yang menyatakan bahwa pendapatan bervariasi dan dapat diprediksi selama kehidupan seseorang. Orang tersebut menggunakan tabungan serta pinjaman untuk meratakan konsumsi selama hidupnya. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kelompok umur tertentu dengan pola konsumsi dan menabung. Menurut Kuznets (1960), penduduk yang berperan sebagai konsumen, penabung, dan produsen memiliki peran dalam meningkatkan output agregat dan setiap kelompok umur memiliki perilaku yang berbeda dalam melakukan kegiatan

konsumsi, menabung, dan produksi. Bagaimana dengan penduduk kelompok umur usia produktif?

Hingga saat ini, Provinsi Lampung tengah memasuki masa transisi demografi seiring dengan perkembangan transisi demografi nasional. Transisi demografi ditandai dengan penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Angka fertilitas total (*total fertility rate*/TFR) Indonesia menurun dari 5,61 anak per perempuan menurut Sensus Penduduk (SP) 1971 menjadi 2,28 anak per perempuan menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Sementara itu, angka kematian bayi menurun dari 47 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2000 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup pada SUPAS 2005, 26 per 1.000 kelahiran hidup pada SP 2000, dan 22 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada SUPAS 2015. Penurunan tingkat kelahiran dan kematian ini menyebabkan adanya perubahan struktur umur penduduk

Berdasarkan komposisi penduduknya, penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2020 berbentuk konstruktif, yang berarti sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur produktif yang ditandai dengan bentuk piramida penduduk yang cembung di bagian tengah. Dalam kondisi ini, penduduk usia kerja akan mengalami peningkatan sehingga menurunkan rasio ketergantungan umur. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, rasio ketergantungan umur penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah sebesar 45,87, yang berarti dari setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 52,20. Kondisi peningkatan penduduk usia kerja dan penurunan rasio ketergantungan penduduk disebut sebagai bonus demografi atau *windows of opportunity*. Di Indonesia, bonus demografi telah dimulai sejak 1980-an sebagai dampak dari penurunan tingkat kelahiran dan kematian karena adanya program Keluarga Berencana (Adioetomo, 2016) dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025.

Isu utama dalam pembahasan profil usia produktif antara lain bonus demografi ditandai oleh tingginya jumlah penduduk usia produktif, jumlah dan sebaran penduduk usia produktif/pemuda/milenial untuk melihat potensi cakupan penduduk usia produktif di Provinsi Lampung, dan kualitas penduduk usia produktif/pemuda/milenial yang menggambarkan potensi usia produktif dalam menjawab tantangan bonus demografi dan persaingan global.

A. Penduduk Usia Produktif: Motor Penggerak Agenda Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15–64 tahun. Menurut OECD (2021), penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. William H. Frey mengelompokkan generasi ke dalam 6 kelompok utama (Tabel 3.1). Empat generasi, yaitu generasi Z, generasi Y, generasi X, dan generasi *baby boomer* masuk ke dalam kategori penduduk usia produktif.

Tabel 3.1. Klasifikasi Generasi Menurut William H. Frey

No.	Generasi	Tahun Lahir	Usia Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Post Generasi Z	2013–sekarang	0–7 Tahun
2	Generasi Z	1997–2012	8–23 Tahun
3	Generasi Y (Milenial)	1981–1996	24–39 Tahun
4	Generasi X	1965–1980	40–55 Tahun
5	Generasi Baby Boomer	1946–1964	56–74 Tahun
6	Generasi Pre-Boomer	Sebelum tahun 1945	75+ Tahun

Sumber : William H. Frey

Jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) Provinsi Lampung berdasarkan hasil SP2020 mencapai 6,18 juta jiwa (tepatnya 6.175.463) atau 68,56 persen dari total penduduk Provinsi Lampung. Dominannya jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah mengindikasikan keberadaan bonus demografi di wilayah tersebut. Bonus demografi adalah suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun). Bonus demografi dapat dilihat melalui angka *dependency ratio* (rasio ketergantungan).

Komposisi penduduk Provinsi Lampung hasil SP2020 menurut kelompok usia 0–14 tahun mencapai 25,42 persen, usia 15–64 tahun mencapai 68,56 persen, dan usia 65+ tahun 6,03 persen. Ini artinya, jumlah total usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun) mencapai 31,45 persen dan sisanya, 68,56 persen merupakan persentase kelompok usia produktif. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa pada tahun 2020, Provinsi Lampung tengah “menikmati” bonus demografi. *Dependency ratio* Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 45,87.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mencapai rasio ketergantungan penduduk yang rendah. Saat ini, ada 14 kabupaten/kota telah mencapai rasio ketergantungan penduduk kurang dari 50 dan sisanya, 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, rasio ketergantungan penduduknya masih di atas 50 atau tepatnya 53,02.

Bloom et al. (2003) menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik bonus demografi (*windows of opportunity*). Pertama, jika lebih banyak pekerja, akan lebih banyak output yang dihasilkan. Kedua, penambahan akumulasi kekayaan jika terdapat tabungan dan diinvestasikan untuk sesuatu yang produktif. Terakhir, persediaan modal manusia yang besar jika terdapat investasi yang tepat untuk meningkatkan modal manusia tersebut. Keuntungan dari *windows of opportunity* tersebut tidak selamanya akan bertahan karena setelah masa bonus demografi habis akan timbul permasalahan baru, yaitu penuaan populasi dan peningkatan rasio ketergantungan umur.

Penduduk usia produktif memiliki peran strategis dalam pembangunan. Bloom & Williamson (1998) mengemukakan bahwa transisi demografi meningkatkan rasio

penduduk usia kerja dan berkontribusi sebesar 30 persen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Timur. Pengaruh positif penduduk usia kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh penemuan Yi & Li (2017) dan Aksoy et al. (2017). Selain itu, Brunow & Hirte (2006) juga mendapatkan bukti bahwa kelompok usia yang paling signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kelompok usia 30–44 tahun. Sebaliknya, Lindh & Malmberg (1999) menemukan bahwa kelompok usia muda memiliki pengaruh yang ambigu terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Lindh & Malmberg juga mendapatkan bukti bahwa kelompok usia 50–64 tahun merupakan kelompok yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bonus demografi adalah kesempatan emas bagi Indonesia dan Provinsi Lampung untuk mempercepat laju pembangunan. Bonus demografi hanya terjadi sekali sehingga harus dimanfaatkan dengan maksimal. Apabila peningkatan penduduk usia kerja tidak dapat termanfaatkan dengan baik maka ancaman demografi akan menghadang. Bukannya “bonus” yang didapat, justru *malah* beban bagi pembangunan. Di samping itu, kebijakan yang berbeda juga perlu diterapkan pada setiap wilayah, mengingat terdapat variasi antarwilayah dalam mencapai *windows of opportunity* (Adioetomo, 2016). Indonesia bisa belajar dari negara yang berhasil melewati bonus demografi seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Beberapa cara dapat dilakukan dalam memanfaatkan bonus demografi, yaitu meningkatkan penawaran tenaga kerja, meningkatkan tabungan, meningkatkan kualitas angkatan kerja, dan meningkatkan permintaan domestik.

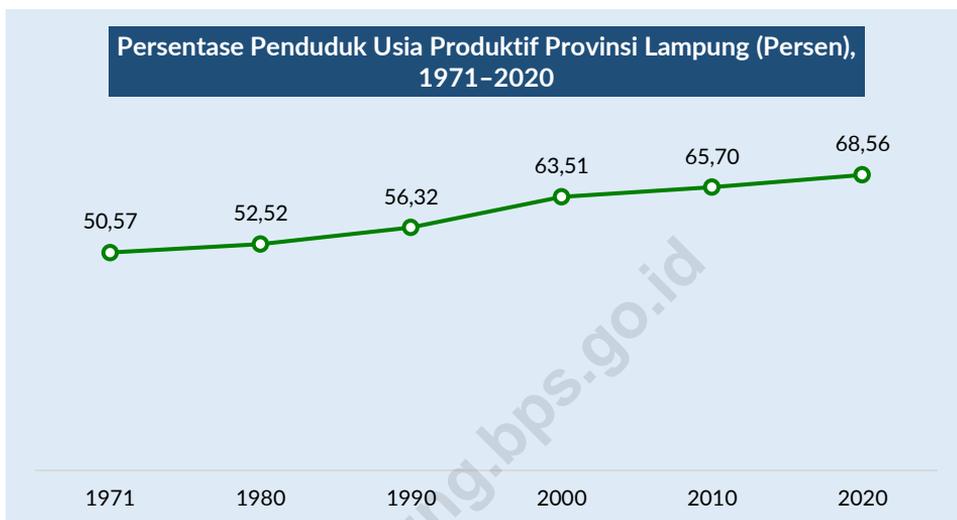
Peran penduduk usia produktif/pemuda/milenial dalam menghadapi bonus demografi menjadi sangat penting bagi pembangunan. Penduduk usia produktif harus terlibat aktif dan ambil bagian dalam perekonomian. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif juga harus terus meningkatkan kualitasnya. Sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005–2025, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) maka peran penduduk usia produktif menjadi sangat krusial dalam pencapaian target-target pembangunan nasional.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menyusun berbagai kebijakan terkait dengan penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif diupayakan pemerintah melalui agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN IV 2020–2024. Keberhasilan target pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045, khususnya poin pertama, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.

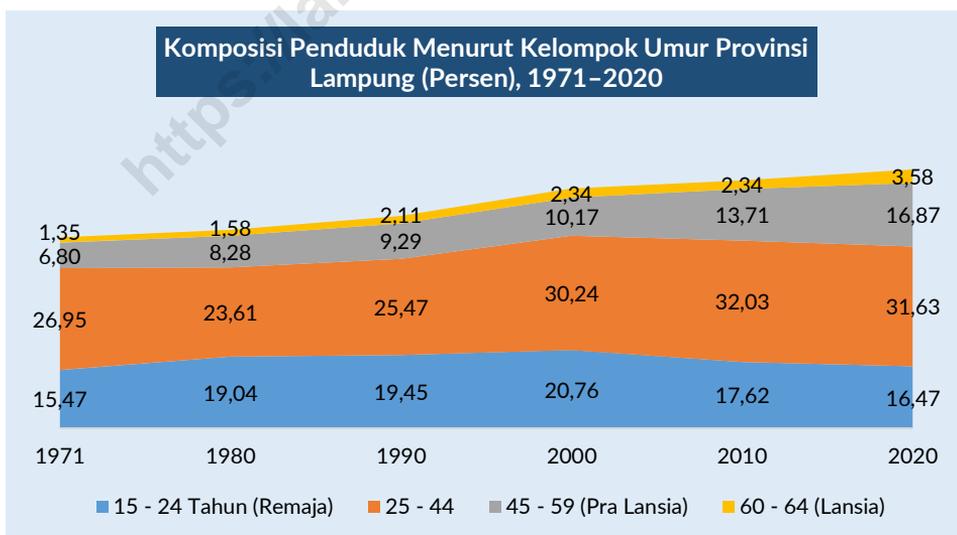
B. Meretas Jalan Menuju Indonesia Emas (Tren Usia Produktif)

Lebih dari separuh penduduk Provinsi Lampung yang berusia produktif sudah dimulai dari tahun 1971. Berdasarkan Sensus Penduduk 1971, persentase usia produktif mencapai 50,57 persen. Jumlah penduduk usia produktif dari tahun 1971 sampai dengan 2020 terus mengalami kenaikan. Hasil Sensus Penduduk

2020, persentase usia produktif di Provinsi Lampung sudah mencapai 68,56 persen. Sementara bonus demografi di Provinsi Lampung diperkirakan mulai bergulir pada tahun 2014 (angka proyeksi hasil SP2010). Hal ini ditandai dengan besaran *dependency ratio* yang mencapai 49,81.



Gambar 3.1. Persentase Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung (Persen), 1971-2020

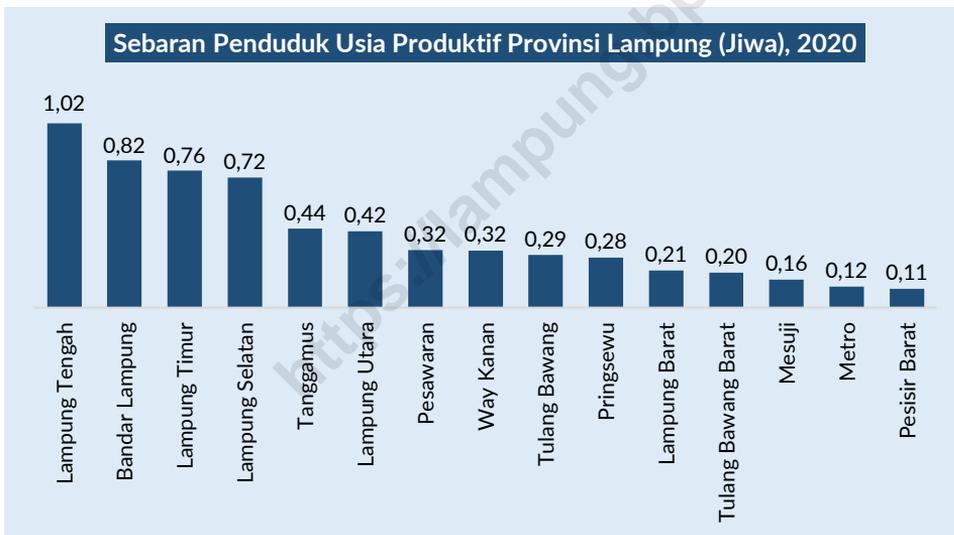


Gambar 3.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Lampung (Persen), 1971-2020

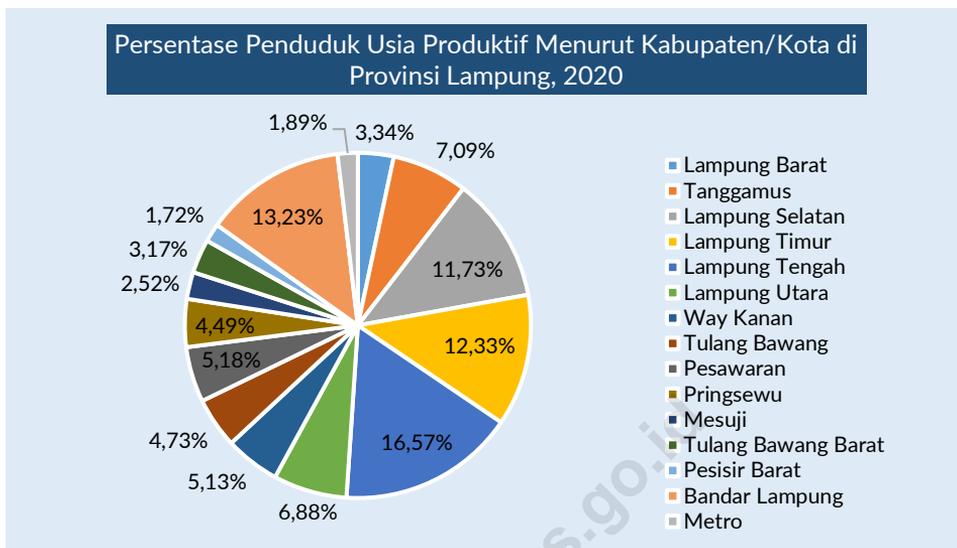
Pada Gambar 3.1 di atas, kita dapat lihat bahwa persentase penduduk usia produktif di Provinsi Lampung terus meningkat. Peningkatan persentase penduduk usia produktif disebabkan peningkatan persentase penduduk pada berbagai kelompok umur di dalamnya, kecuali penduduk remaja (15–24 tahun).

Selama periode 2010–2020, sebaran penduduk usia produktif kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga mengalami pergeseran. Pada tahun 2010, persentase penduduk usia produktif tertinggi berada di Kota Bandar Lampung (69,25 persen) disusul Kota Metro (69,03 persen), dan Kabupaten Lampung Barat (67,77 persen). Pada tahun 2020, persentase penduduk usia produktif tertinggi juga masih berada di Kota Bandar Lampung (70,07 persen) dan Kabupaten Lampung Tengah (70,07 persen) disusul Kota Metro (69,05 persen).

Apabila kita lihat sebarannya berdasarkan jumlah, pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif tertinggi berada di Kabupaten Lampung Tengah (1,02 juta jiwa), disusul Kota Bandar Lampung (0,82 juta jiwa), dan Kabupaten Lampung Timur (0,76 juta jiwa).



Gambar 3.3. Sebaran Penduduk Usia Produktif (Jiwa), 2020



Gambar 3.4. Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020

Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal SDM yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Republik Indonesia ke-100, Indonesia diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta pemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Indonesia Emas 2045 adalah masa depan Indonesia yang diimpikan sejak lama dan tengah dalam perjalanan untuk segera diwujudkan. Impian Indonesia 2015-2085 yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk membangun negara demokratis, bersih dari korupsi, dan kuat. Lalu, bagaimana penduduk usia produktif dapat menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 tersebut?

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015, jumlah penduduk usia produktif di Lampung akan mencapai 65,23 persen (6,34 juta jiwa) pada tahun 2045. Namun demikian, *dependency ratio* di tahun tersebut diperkirakan mencapai 53,30. Pada tahun tersebut diperkirakan bonus demografi telah dilewati dan penduduk Provinsi Lampung mulai masuk pada masa penuaan penduduk. Untuk menjawab Indonesia Emas 2045, penduduk usia produktif harus menyiapkan diri dengan meningkatkan kualitas keahlian, pendidikan dan pengetahuan, serta kreativitas berusaha (*entrepreneurship*).

C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang

Beberapa negara seperti Brazil dan Afrika Selatan dianggap para *demographer* dan ekonom gagal dalam memanfaatkan bonus demografi. Kegagalan tersebut terjadi karena negara tidak berhasil mendorong para pemudanya meningkatkan bekal

yang cukup. Negara dianggap abai dengan tidak mendorong anak mudanya kreatif untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Secara makro, kualitas SDM dapat diukur dengan berbagai indikator. Indikator paling umum adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dari tahun ke tahun juga terus mengalami perbaikan. Namun demikian, hingga tahun 2021 capaian pembangunan manusia di Provinsi Lampung masih tergolong kategori “sedang”. Pada tahun 2016 besaran IPM Provinsi Lampung mencapai 67,65, terus naik hingga pada tahun 2021 mencapai 69,90 atau terjadi peningkatan 0,72 persen rata-rata per tahun.

Pada lingkup nasional, capaian Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata provinsi di Indonesia. Rata-rata IPM provinsi se-Indonesia pada tahun 2021 mencapai 71,36 dan IPM Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 72,29. Selain Provinsi Lampung, secara umum tren peningkatan IPM juga terjadi pada seluruh provinsi. Pertumbuhan rata-rata IPM per tahun Provinsi Lampung untuk tahun 2016–2021 lebih tinggi dari semua provinsi di Sumatera dengan capaian 0,72 persen.

Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia sudah tergolong dalam kategori tinggi. Status IPM dikategorikan tinggi jika mempunyai skor $70 \leq \text{IPM} < 80$ dan berstatus sedang jika skor $60 \leq \text{IPM} < 70$. Pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2021 berstatus sedang bersama 10 provinsi lainnya di Indonesia, dengan status terdekat adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku. Capaian 22 provinsi lainnya telah menyandang status pembangunan manusia berkategori tinggi. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang berstatus pembangunan sangat tinggi dengan angka IPM mencapai 81,11.

Harapan lama sekolah (HLS) Provinsi Lampung pada tahun 2021 mencapai 12,73 tahun. Ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Provinsi Lampung dapat mencapai hingga jenjang akhir SLTA. Angka HLS Provinsi Lampung berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,08 tahun atau sampai pada tingkat menamatkan jenjang Diploma 1. Provinsi DI Yogyakarta yang memang terkenal sebagai daerah pelajar memiliki HLS tertinggi dibanding provinsi lainnya dengan capaian 15,64 tahun. Provinsi Papua memiliki angka HLS terendah se-Indonesia dengan angka 11,11 tahun atau baru mencapai tingkat 2 SLTA.

Indikator pendidikan lain yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan yang kini mencapai 8,08 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung usia 25 tahun ke atas masih cukup jauh di bawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Rata-rata lama sekolah nasional mencapai 8,54 tahun atau di atas RLS Provinsi Lampung. Provinsi DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi yaitu mencapai 11,17 tahun. Provinsi Papua kembali menjadi provinsi

dengan capaian RLS terendah yaitu 6,76 tahun atau hanya mencapai tingkat 1 SLTP.

Dimensi ekonomi ditinjau dari faktor pengeluaran per kapita yang disesuaikan, merupakan ukuran pendekatan bagi besaran pendapatan per kapita penduduk sebagai komponen penyusun IPM. Biaya pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar Rp10,038 juta per kapita/tahun. Dibanding nasional, nilai pengeluaran per kapita Provinsi Lampung lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai Rp11,156 juta per kapita/tahun. Nilai pengeluaran per kapita terbesar adalah di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp18,520 juta per kapita/tahun atau hampir dua kali pengeluaran di Provinsi Lampung. Sementara itu pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Papua menjadi yang terendah yaitu hanya sebesar Rp6,995 juta per kapita/tahun.

Pembangunan manusia merupakan proses pembangunan yang berbasis manusia, di mana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dan menuntut adanya pemerataan dalam pembangunan. Sampai dengan tahun 2021 capaian IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah IPM nasional. Bahkan pada seluruh indikator pembentuk IPM yaitu harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan bahwa capaian Provinsi Lampung masih berada di bawah nasional. Arah pembangunan ke depan harus lebih memperhatikan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja terutama yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk IPM. Akar permasalahan yang menghambat pembangunan manusia harus segera diidentifikasi dan dicari solusi agar pembangunan bisa berjalan baik dan berkelanjutan.

Adanya disparitas dalam pembangunan antarkabupaten/kota juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia. Jika dilihat per kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, nampak bahwa pembangunan manusia masih belum cukup merata. Capaian pembangunan manusia di beberapa daerah sudah ada yang termasuk dalam kategori tinggi namun masih ada juga beberapa daerah yang capaiannya termasuk pada kategori sedang. Capaian IPM di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro contohnya, sudah jauh di atas IPM Provinsi Lampung secara umum yaitu masing-masing mencapai 77,58 dan 77,49. Bahkan kondisi terakhir tingkat pembangunan manusia Kabupaten Pringsewu juga telah masuk kategori tinggi mencapai 70,45, mengikuti jejak Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun sebelumnya. Sementara capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji merupakan yang terendah yaitu 64,04.

Disparitas pembangunan manusia dimulai dari disparitas capaian di masing-masing dimensi. Derajat kesehatan penduduk antarkabupaten/kota di Provinsi Lampung nampak masih belum merata. Hal ini tergambar dari UHH yang cukup jauh perbedaannya antardaerah.

Capaian derajat kesehatan daerah perkotaan yang memang fasilitasnya lebih memadai relatif lebih baik. Umur harapan hidup Provinsi Lampung mencapai 70,73 tahun, yang berarti bahwa di tahun 2021 seorang bayi yang dilahirkan hidup di provinsi ini secara umum memiliki harapan bisa hidup hingga usia 70,73 tahun.

Umur harapan hidup Kota Metro adalah yang tertinggi mencapai 71,66 tahun sementara Kota Bandar Lampung mencapai 71,42 tahun. Disparitas UHH antarkabupaten masih nampak terlihat. Umur harapan hidup tertinggi pada level kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur sudah mencapai 70,78 tahun sedangkan di Kabupaten Pesisir Barat terendah yaitu mencapai 63,66 tahun.

Ditinjau dari sisi pendidikan, disparitas capaian harapan lama sekolah (HLS) juga masih cukup tinggi. Anak-anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tahun 2021 diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 14 tahun atau setara mengenyam pendidikan hingga lulus D2, sementara HLS penduduk di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Barat belum mencapai 12 tahun atau setara menyelesaikan pendidikan hingga kelas XI.

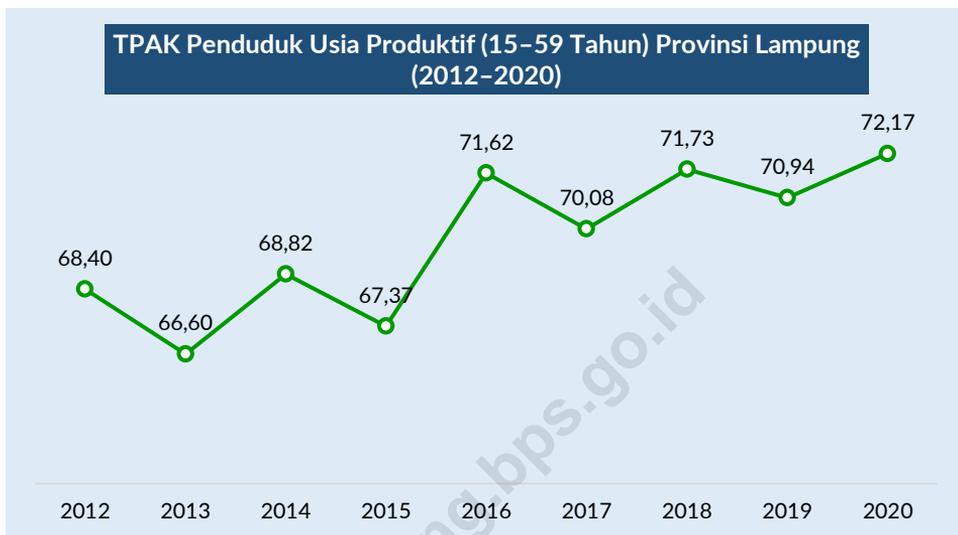
Peningkatan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) provinsi juga tercermin dari indikator RLS kabupaten/kota. Penduduk Kota Metro dan Kota Bandar Lampung yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam hampir 11 tahun masa sekolah. Dengan kata lain, pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di wilayah kedua kota tersebut relatif sudah terpenuhi. Selanjutnya diikuti Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat yang baru mencapai rata-rata setingkat kelas 2 SMP, sementara kabupaten lainnya hanya setingkat kelas 1 SMP.

Untuk indikator IPM dimensi ekonomi, secara relatif masih terlihat adanya disparitas antardaerah. Rata-rata pengeluaran riil penduduk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tahun 2021 adalah yang tertinggi masing-masing mencapai Rp12,247 juta dan Rp11,916 juta per kapita/tahun sedangkan pengeluaran penduduk terendah di Kabupaten Pesawaran sebesar Rp7,934 juta per kapita/tahun. Wilayah kabupaten yang memiliki pengeluaran penduduknya telah berada di atas biaya hidup rata-rata di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pringsewu. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup akan komoditas yang relatif sama, biaya hidup di ketiga wilayah tersebut cenderung lebih tinggi.

D. Penduduk Usia Produktif Menjawab Peluang Ketenagakerjaan

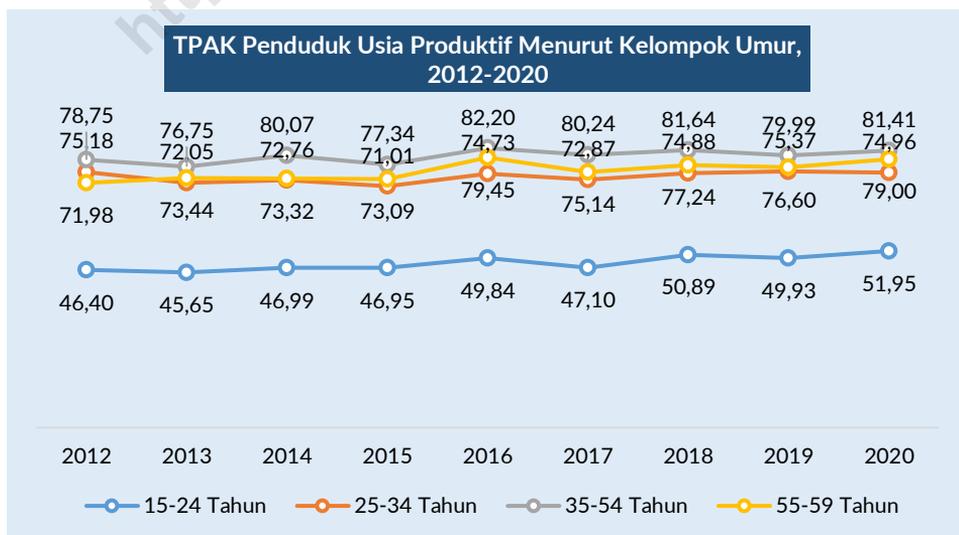
Untuk melihat penduduk usia produktif di Provinsi Lampung dalam menjawab peluang ketenagakerjaan setidaknya ada dua hal utama yang perlu menjadi perhatian. Pertama, perlu dilihat bagaimana tren indikator pasar tenaga kerja usia produktif. Indikator yang perlu dilihat adalah tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk usia produktif (TPAK), tingkat kesempatan kerja penduduk usia produktif (TKK), dan tingkat pengangguran terbuka penduduk usia kerja (TPT). Indikator-indikator tersebut tersedia dalam publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung. Kedua, perlu dianalisis berbagai problem dan tantangan dalam ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, baik dari sisi kualitas (pendidikan misalnya) maupun TPT usia muda. Namun, sebagai catatan, usia kerja yang tersedia dalam publikasi tersebut hanya meng-cover usia 15–59 tahun. Usia 60–64 tahun dalam

publikasi tersebut dikelompokkan dalam usia 60+ tahun sehingga tidak kita gunakan.



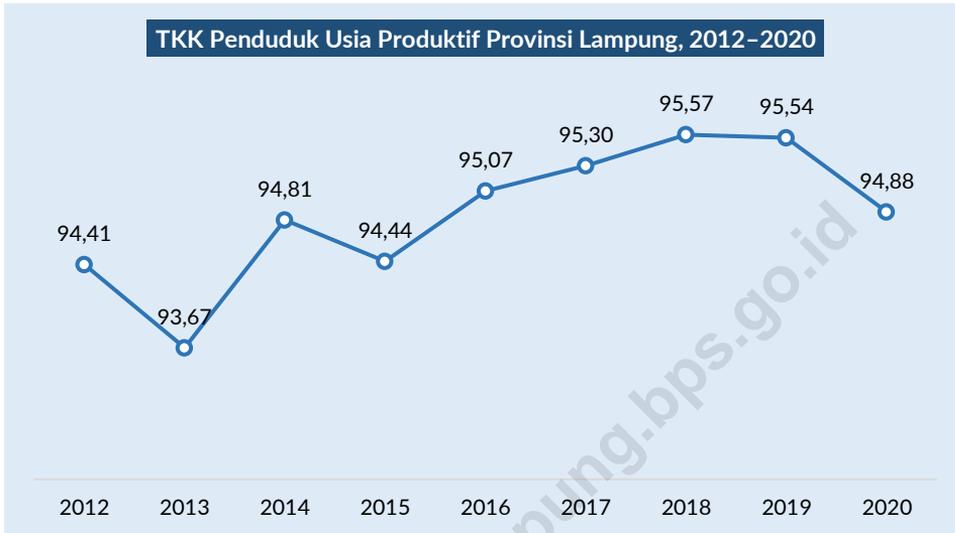
Gambar 3.5. TPAK Penduduk Usia Produktif (15-59 Tahun) Provinsi Lampung (2012-2020)

Pada Gambar 3.5 di atas, dapat kita lihat TPAK penduduk usia produktif (15-59 Tahun) di Provinsi Lampung selama 2012-2020 terus mengalami kenaikan. 72 dari 100 penduduk usia produktif berpartisipasi dalam pasar kerja di tahun 2020.

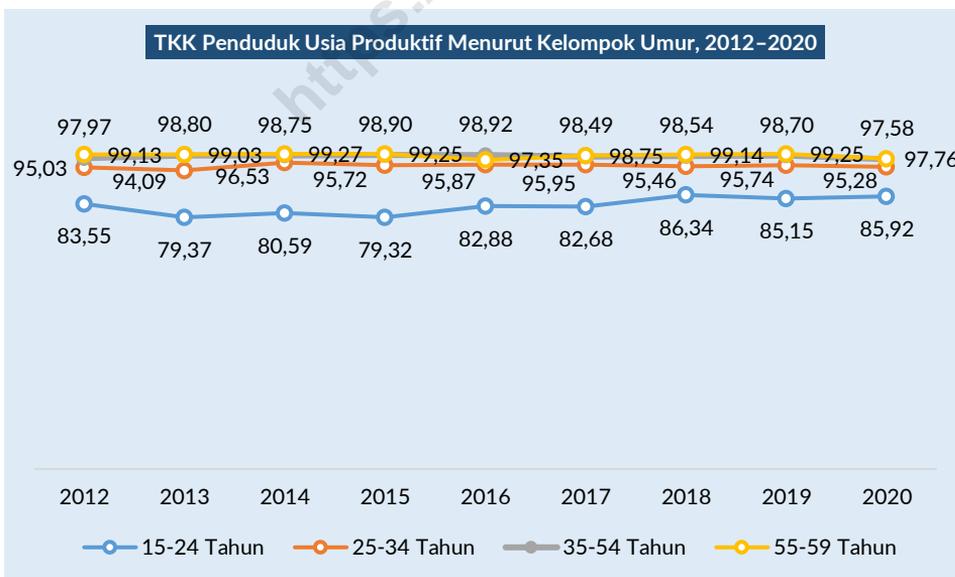


Gambar 3.6. TPAK Penduduk Usia Produktif Menurut Kelompok Umur, 2012-2020

Partisipasi terbanyak berasal dari penduduk usia 35–54 tahun. Sementara partisipasi terkecil berasal dari penduduk usia 15–24 tahun. Partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat setiap tahun pada semua kelompok umur. Dari Gambar 3.6 di atas, penduduk usia produktif semakin tidak produktif seiring bertambahnya umur.

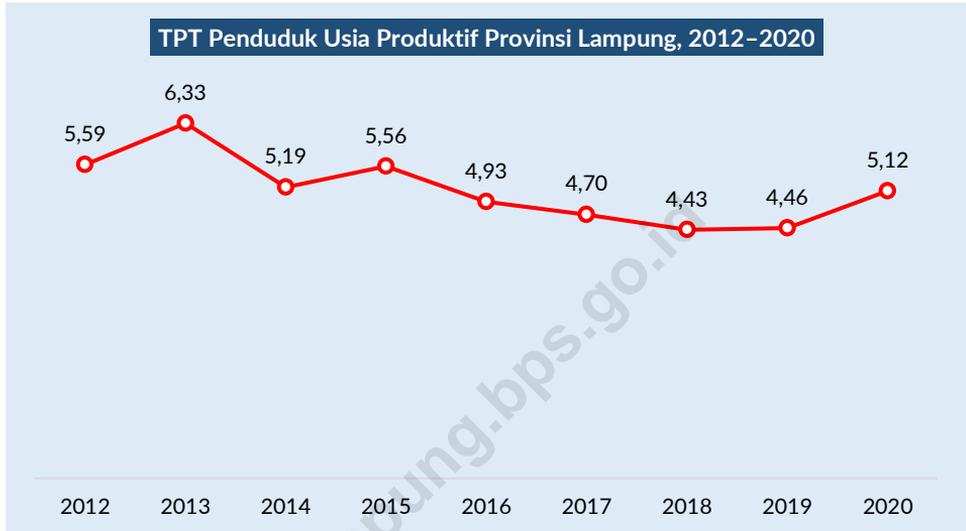


Gambar 3.7. TKK Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung, 2012–2020

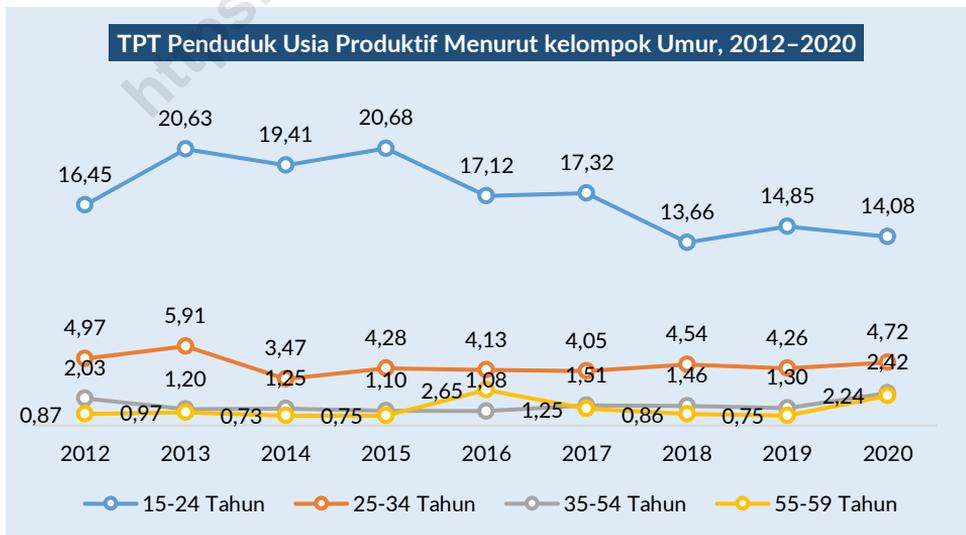


Gambar 3.8. TKK Penduduk Usia Produktif Menurut Kelompok Umur, 2012–2020

Pada Gambar 3.7 dan 3.8 di atas, TKK penduduk usia produktif (15–59 Tahun) di Provinsi Lampung selama 2012–2020 secara umum meningkat, kecuali tahun 2020 (diperkirakan akibat pandemi Covid-19). Pada tahun 2020, dari 100 penduduk usia produktif terdapat 92 orang yang bekerja. Penyerapan tenaga kerja meningkat seiring bertambahnya umur.



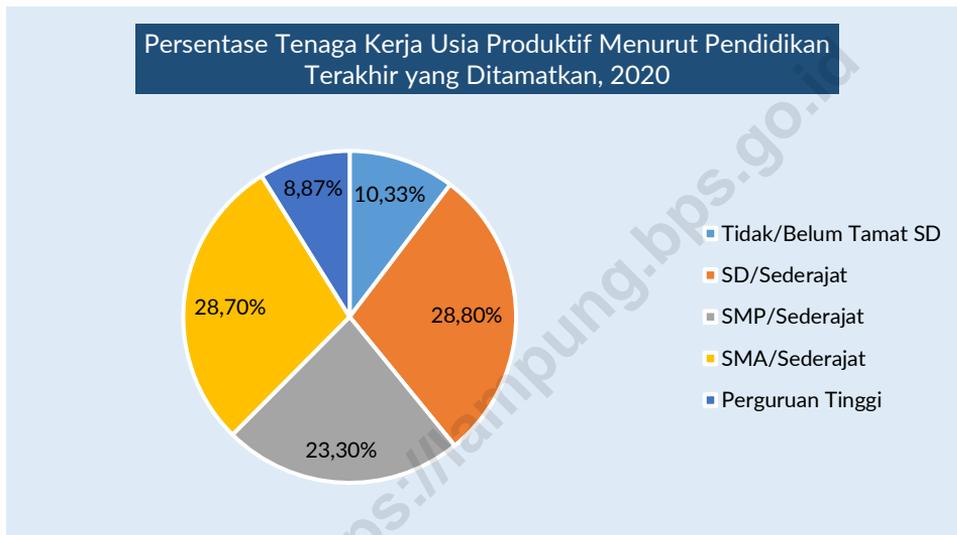
Gambar 3.9. TPT Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung, 2012–2020



Gambar 3.10. TPT Penduduk Usia Produktif Menurut kelompok Umur, 2012–2020

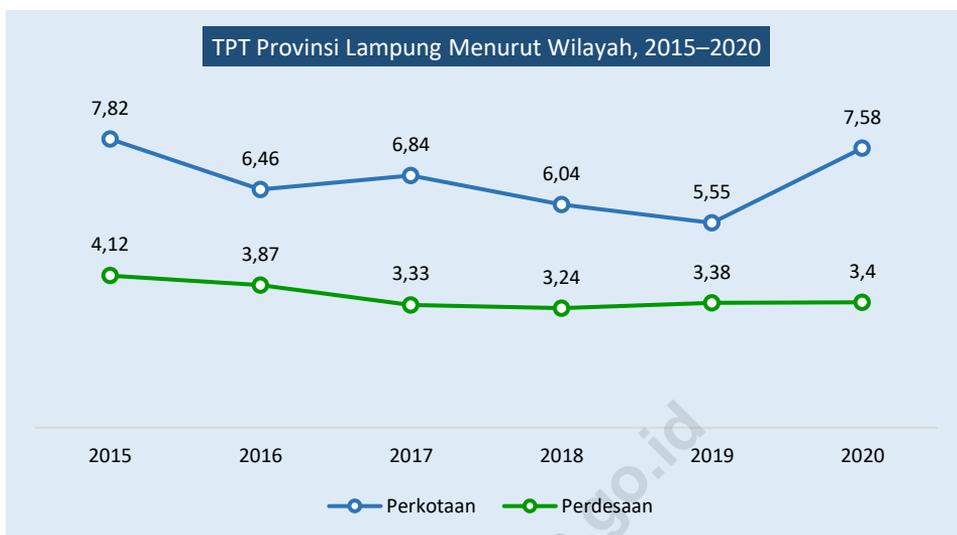
Pada Gambar 3.9 dan 3.10 di atas, TPT penduduk usia produktif (15–59 Tahun) di Provinsi Lampung selama 2012–2020 secara umum menurun, kecuali tahun 2020 (diperkirakan akibat pandemi Covid-19). Pada tahun 2020, 5 dari 100 penduduk usia produktif menganggur.

Tantangan penduduk usia produktif di Provinsi Lampung masih berada pada kualitas dan pengangguran usia muda. Pendidikan tenaga kerja di Provinsi Lampung masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah (SD, SMP, SMA). Bahkan, masih ada penduduk usia produktif yang tidak tersentuh pendidikan (10,33 persen).



Gambar 3.11. Persentase Tenaga Kerja Usia Produktif Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2020

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Lampung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada tahun 2020. Hal ini diperkirakan pemicu utamanya adalah akibat efek pandemi Covid-19. TPT wilayah perkotaan selalu lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Pada tahun 2020, kenaikan TPT wilayah perkotaan naik sangat tajam dibandingkan tahun 2020. Angkanya hampir dua kali lipatnya. Sebagian besar pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan kerja diindikasikan menjadi penyebab mengapa pengangguran terus terjadi.



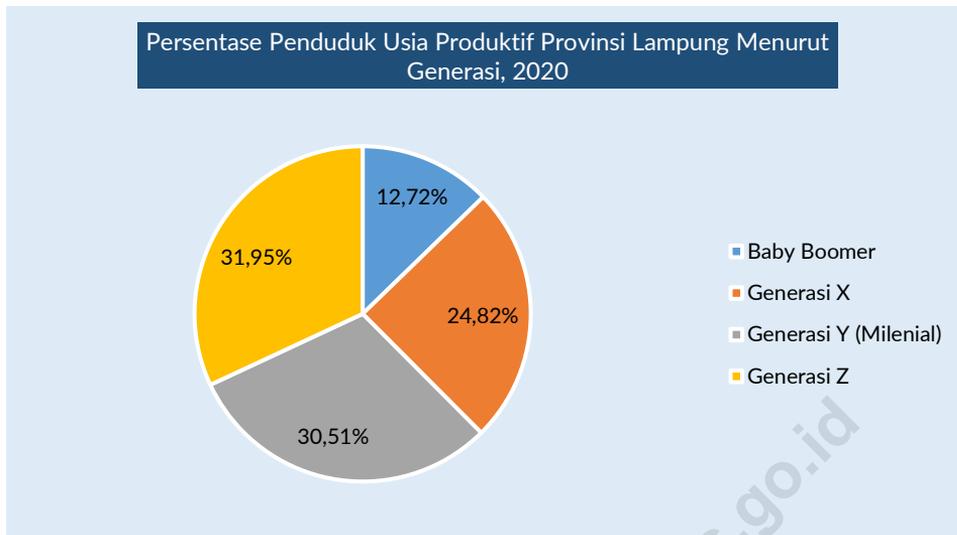
Gambar 3.12. TPT Provinsi Lampung Menurut Wilayah, 2015–2020

E. Penduduk Usia Produktif Menurut Generasi

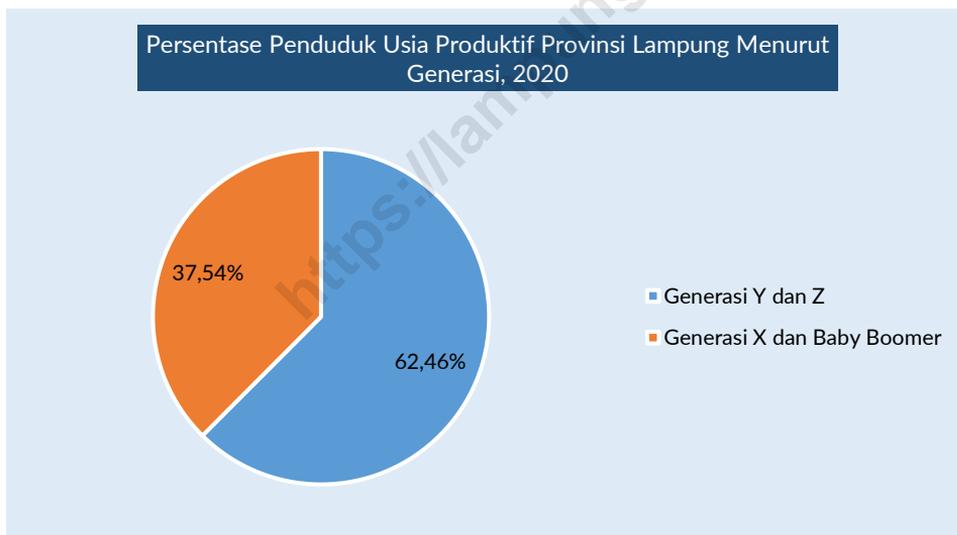
Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Lampung didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 27,80 persen dari total populasi (2,48 Juta orang) dan generasi milenial sebanyak 26,54 persen dari total populasi Provinsi Lampung. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Kelompok Penduduk usia produktif terdiri dari kelompok generasi Z, Y, X (milenial), dan *baby boomer*. Generasi Z memiliki persentase paling besar dibandingkan generasi lainnya. Persentase generasi Z mencapai 31,95 persen dari total penduduk usia produktif. Selanjutnya generasi Y yang mencapai 30,51 persen, generasi X mencapai 24,82 persen, dan generasi *baby boomer* mencapai 12,72 persen.



Gambar 3.13. Persentase Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung Menurut Generasi, 2020



Gambar 3.14. Persentase Penduduk Usia Produktif Provinsi Lampung Menurut Generasi, 2020

F. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini adalah sebagai berikut :

1. Penduduk usia produktif khususnya yang berkualitas, baik dari sisi pendidikan, karakter, dan kompetensi memiliki peran penting dalam pemanfaatan bonus demografi dan meningkatkan pembangunan daerah dan nasional.
2. Penduduk usia produktif Provinsi Lampung terus meningkat.
3. Jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat memunculkan banyak potensi pada tahun 2045. Namun, ada beberapa tantangan dalam pemanfaatannya. Provinsi Lampung harus berbenah sejak sekarang untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut agar bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4. Secara nasional, meskipun mengalami peningkatan, kualitas penduduk usia produktif Provinsi Lampung masih rendah dibanding provinsi lain.
5. Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah pembangunan yang paling krusial. Peran penduduk usia produktif pada hal ini harus terus ditingkatkan. Untuk itu kualitas penduduk usia produktif bekerja perlu terus dipantau dan ditingkatkan.
6. Saat ini penduduk usia produktif di Lampung didominasi oleh penduduk usia muda dan prima (generasi Z dan Y). Berbagai masalah pada generasi muda harus segera diatasi agar mereka bisa berkontribusi maksimal sebagai motor penggerak ekonomi bangsa.
7. Keberadaan multigenerasi dalam dunia kerja berpotensi memicu konflik, sehingga dibutuhkan aturan dan kebijakan yang efektif demi mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman diantara mereka.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. Berita Resmi Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> [diakses 30 Agustus 2021].
- OECD. 2021. Working Age Population. OECD Data. <https://data.oecd.org/pop/working-age-population.htm> [diakses 30 Agustus 2021]
- World Bank. 2021. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-1552-2.
- BPS. 2020. Statistik Pemuda Indonesia 2020. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Pemerintah RI, 2020. LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024, Jakarta: Pemerintah RI.
- Kemendikbud. 2017. Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045. Jakarta.
- WHO. 2020. Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera. Jakarta. Indonesia: World Health Organization, Regional Office for South-East Asia; 2020. Lisensi: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- BNN. 2020. Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019. Jakarta Timur: PUSLITDATIN Badan Narkotika Republik Indonesia.



4

Profil Lansia

- A. Kualitas Hidup Meningkat, Lampung Menuju *Ageing Population*
- B. Lansia SMART
- C. Sebaran Lansia
- D. Lansia dan Keluarga
- E. Perlindungan terhadap Lansia
- F. Kesimpulan



Lansia akan menjadi potensi apabila sehat, mandiri, aktif, produktif (SMART) dan berdayaguna

Lansia Menuju *Ageing Population*

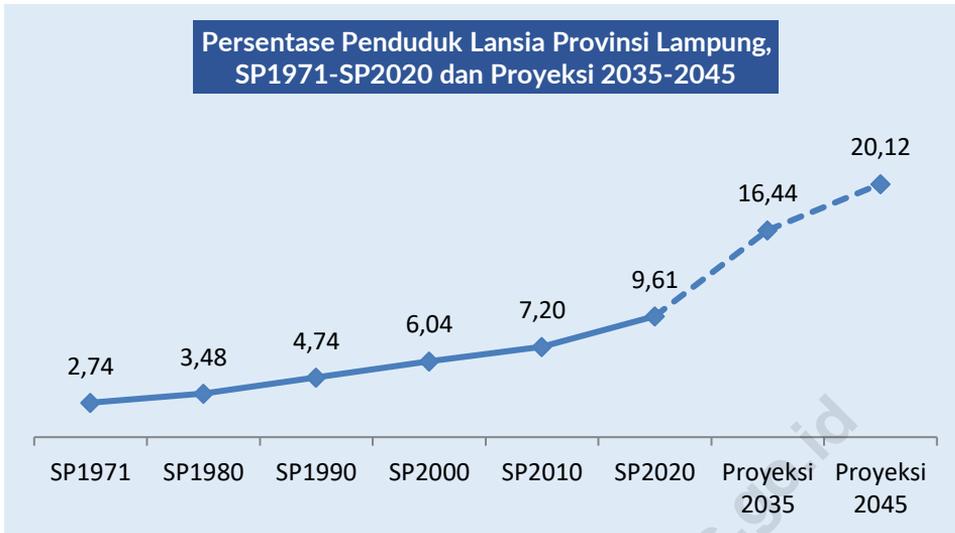
Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup yang makin meningkat, sehingga jumlah penduduk lanjut usia (lansia) makin bertambah. Sejalan dengan itu, pemerintah dengan berbagai program pembangunan mengantisipasi keadaan ini, antara lain dengan pemberdayaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan khusus lansia, agar tidak menjadi bom waktu/permasalahan bangsa pada waktu yang akan datang.

Perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lanjut Usia Internasional yang tertuang dalam resolusi PBB No. 045/206 Tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 Mei. Diharapkan dengan memperingati Hari Lansia tersebut, pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia.

A. Kualitas Hidup Meningkat, Lampung Menuju *Ageing Population*

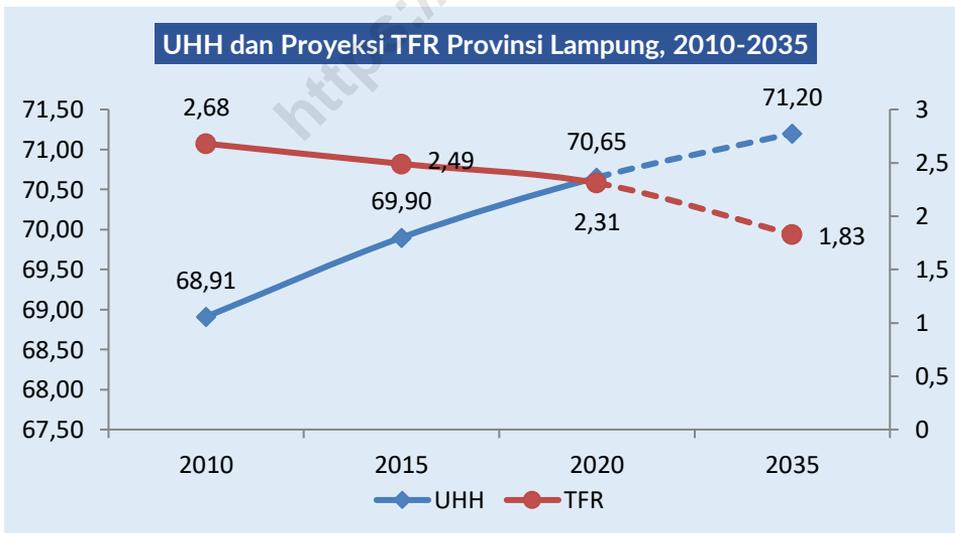
Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Perkembangan demografi ini dapat membawa dampak di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk itu diperlukan data terkait kelanjutusiaan sebagai bahan pemetaan dan strategi kebijakan sehingga pertumbuhan jumlah penduduk lansia menjadi potensi yang turut membangun bangsa.

Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia di provinsi Lampung meningkat mencapai 3,5 kali lipat, yakni dari 2,74 persen pada tahun 1971 menjadi 9,62 persen atau sebesar 865 ribu lansia pada tahun 2020, dimana lansia laki-laki sekitar tiga persen lebih banyak dibandingkan lansia perempuan (51,86 persen berbanding 48,14 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Provinsi Lampung berada dalam masa transisi menuju *era ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen.



Gambar 4.1. Persentase Penduduk Lansia Provinsi Lampung, SP1971-SP2020 dan Proyeksi 2035-2045

Pembangunan kesehatan yang telah dicapai oleh Provinsi Lampung selama ini memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, selain penurunan angka kelahiran, angka kesakitan, dan angka kematian, tercermin juga dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Provinsi Lampung. Konsekuensinya adalah terjadinya peningkatan persentase penduduk lansia.



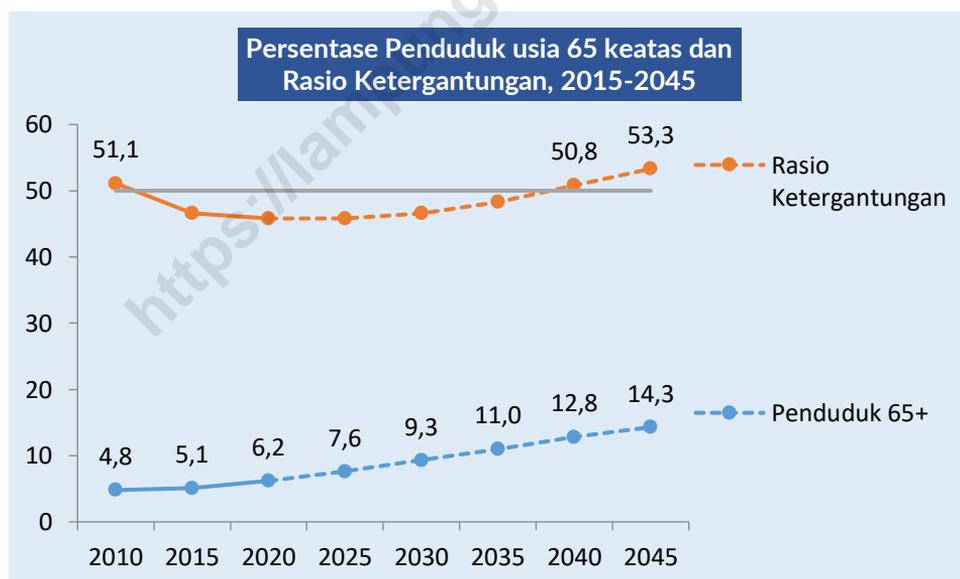
Gambar 4.2. UHH dan Proyeksi TFR Provinsi Lampung, 2010-2035

Berdasarkan Gambar 4.2, tepatnya dari data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan UHH saat lahir Provinsi Lampung dari 68,91 tahun pada tahun 2010 menjadi 70,65 tahun pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 71,20 pada tahun 2035 mendatang. Apabila

diikuti dengan penurunan angka kelahiran dalam hal ini *Total Fertility Rate* (TFR), proporsi lansia akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut transisi menuju struktur penduduk tua (*ageing population*).

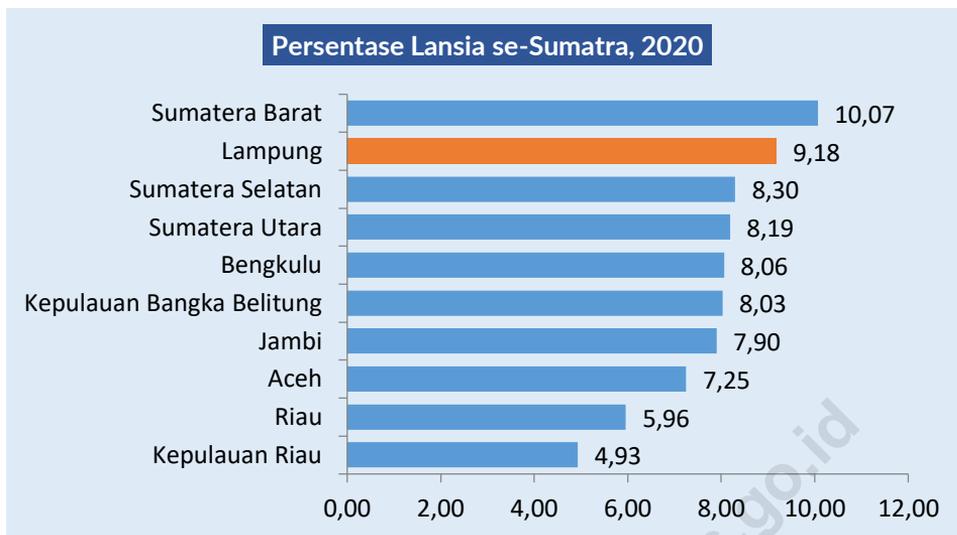
Meskipun Provinsi Lampung sekarang berada dalam periode jendela kesempatan (*Window of Opportunity*) untuk dapat memetik bonus demografi, tetapi Provinsi Lampung harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*. Hal ini terlihat dari angka ketergantungan yang diprediksi akan kembali meningkat di atas 50 persen pada tahun 2040, yang juga bermakna kembali naiknya beban ekonomi. Kembali naiknya angka ketergantungan tersebut diiringi dengan semakin besarnya jumlah penduduk lansia. Besaran jumlah lansia Lampung di masa depan tersebut tentunya bisa berdampak positif maupun negatif.

Pemerintah perlu mulai mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Lampung. Jika penduduk lansia tersebut memiliki kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, serta dapat terus berkontribusi dalam perekonomian, maka kelompok penduduk tersebut berpeluang membuka jendela kesempatan untuk Provinsi Lampung memperoleh bonus demografi kedua di masa yang akan datang.



Gambar 4.3. Persentase Penduduk usia 65 keatas dan Rasio Ketergantungan Provinsi Lampung, 2015-2045

Jika berdasarkan hasil SP2020, persentase lansia di provinsi Lampung cukup tinggi dibanding provinsi lainnya se-Sumatra. Lampung berada di posisi kedua (9,18 persen) setelah Provinsi Sumatra Barat yang sebesar 10,07 persen. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan proporsi lansia terendah se-Sumatra dengan persentase kurang dari 5 persen.



Gambar 4.4. Persentase Lansia se-Sumatra, 2020

B. Lansia SMART

Proses penuaan penduduk berdampak pada berbagai aspek kehidupan, ekonomi maupun sosial. Penurunan fungsi tubuh seiring kelanjutusiaan dapat menimbulkan permasalahan kesehatan, yang meningkatkan risiko disabilitas. Kondisi ini menghadapkan lansia pada berbagai kebutuhan tambahan dari sisi kesehatan dan asistensi. Usia lansia juga secara siklus akan menggeser lansia kepada usia pensiun, sebagai bagian dari kelompok yang tidak produktif secara ekonomi. Lansia Indonesia yang banyak disebutkan ‘tua sebelum kaya’, tentunya akan lebih memperbesar kebergantungan lansia pada kelompok penduduk usia produktif. Sehingga kelanjutusiaan dan segala kebutuhannya menuntut keluarga penanggung lansia memperoleh pendapatan ekstra untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini menghadapkan penduduk usia produktif menjadi bagian dari *sandwich generation*. Mereka harus menghidupi anak istri di dalam keluarga inti, orang tua, dan dirinya sendiri. Termasuk mempersiapkan masa pensiun mereka sendiri.

Dari sisi sosial, keberadaan anggota rumah tangga lain utamanya pasangan hidup lansia sangat berarti untuk menemani dan menghabiskan sisa perjalanan hidup. Namun pergeseran tatanan hidup keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti tentunya menjadi kendala tersendiri bagi kebutuhan dukungan hidup bagi lansia ini. Berbagai kondisi kelanjutusiaan tersebut, merupakan suatu siklus hidup manusia yang dapat disikapi dan dipersiapkan sejak dini. Bagaimana kondisi lansia di hari ini ditentukan oleh pola hidup mereka di masa lalu. Lansia akan menjadi potensi apabila sehat, mandiri, aktif, produktif (SMART) dan berdayaguna.

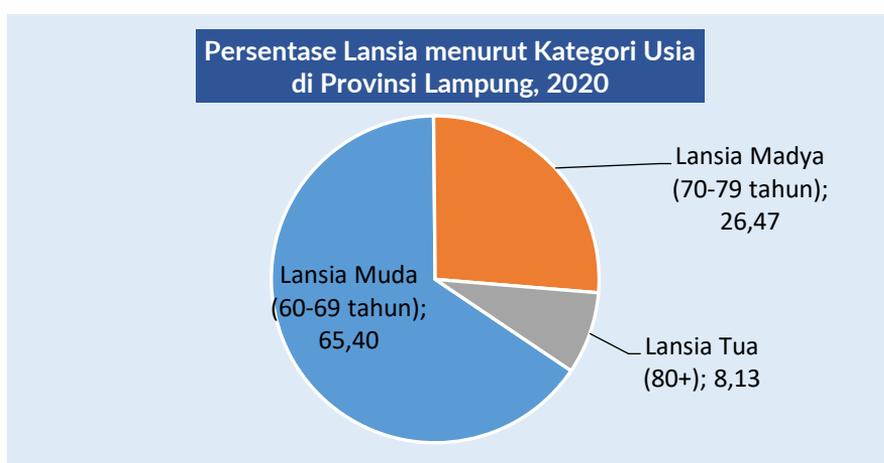
Perhatian pemerintah terhadap kehidupan para lansia Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia.

Pada RPJMN 2020-2024 pemerintah juga telah menyusun strategi guna mengantisipasi kondisi Indonesia yang telah memasuki ageing population. Wujud antisipasinya antara lain dengan penyiapan terkait kelanjutusiaan pada berbagai aspek untuk menciptakan penduduk lansia yang sehat dan produktif. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan kawasan yang ramah lansia.

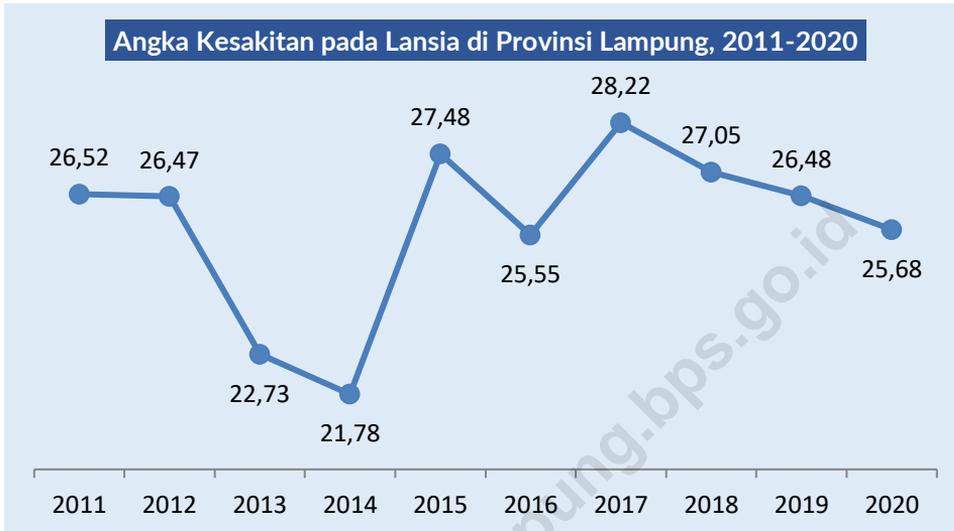
Selain itu, pada masa pandemi yang sekarang terjadi pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi lansia. Salah satunya melalui Panduan Perlindungan Lanjut Usia yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya perlindungan terhadap lansia, khususnya perempuan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi Gerakan Sayang Lansia yang tujuannya untuk mendorong lansia sehat, aman, dan terlindungi.

Semakin banyaknya perhatian yang tercurah terkait kelanjutusiaan diharapkan menghasilkan regulasi yang terarah, terstruktur dan komprehensif serta mampu memayungi para lansia agar mereka mampu menjadi lansia yang mandiri, bermartabat, dan produktif. Sehingga dengan begitu kehadiran lansia tidak lagi dipandang sebelah mata, akan tetapi mampu memberikan keadilan yang proporsional.



Gambar 4.5. Persentase Lansia menurut Kategori Usia di Provinsi Lampung, 2020

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.5, persebaran penduduk lansia di Provinsi Lampung menurut tipe daerah masih didominasi oleh lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun) dengan persentase 65,40 persen, diikuti oleh lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun) sebesar 26,47 persen dan terakhir lansia tua (kelompok umur 80+ tahun) sebesar 8,13 persen.



Gambar 4.6. Angka Kesakitan pada Lansia di Provinsi Lampung, 2011-2020

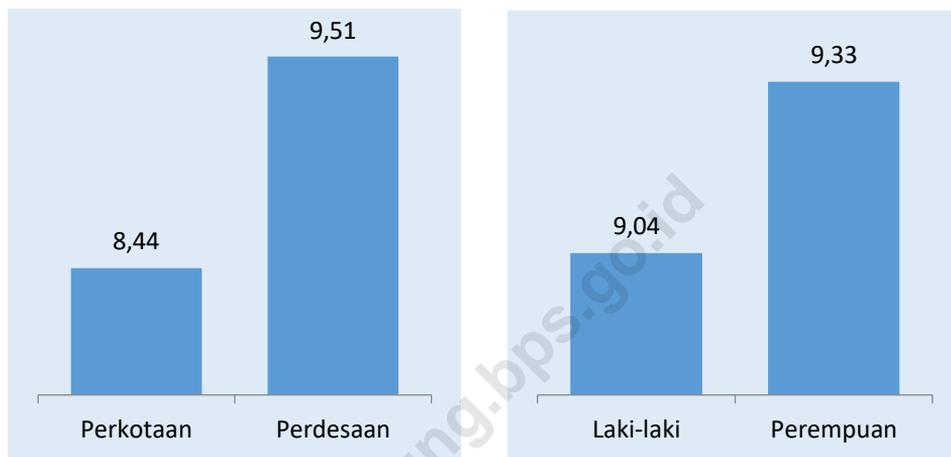
Dalam kurun waktu 2011-2020, angka kesakitan pada lansia di provinsi Lampung cenderung berfluktuasi. Tahun 2014 merupakan titik terendah angka kesakitan lansia yaitu sebesar 21,78 persen, sedangkan tahun 2017 angka kesakitan lansia mencapai puncak tertinggi yaitu mencapai 28,22 persen. Sementara itu, persentase lansia yang mengalami sakit tahun 2020, besarnya mencapai seperempat lansia yang ada di Lampung yaitu sebesar 25,68 persen.

Pada umumnya, penyakit yang dialami para lansia merupakan penyakit tidak menular yang bersifat degeneratif atau disebabkan oleh faktor usia misalnya penyakit jantung, diabetes mellitus, stroke, rematik dan cedera (Kemenkes RI, 2019). Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit kronis, berbiaya besar, dan apabila tidak disembuhkan akan menimbulkan ketidakmampuan atau disabilitas sehingga para lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

C. Sebaran Lansia

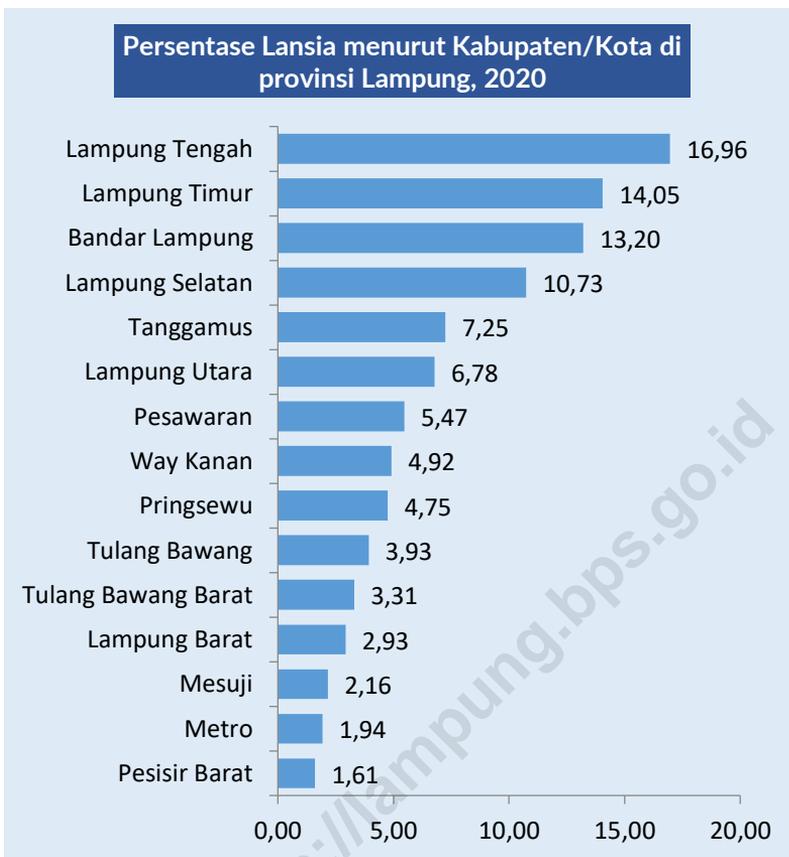
Proses menua merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar tubuh. Pada masa ini, sedikit demi sedikit seseorang akan mengalami kemunduran fisiologis, psikologis, dan sosial, dimana perubahan ini akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk pada aspek kesehatan. Pesatnya peningkatan penduduk tua atau lanjut usia merupakan dampak dari peningkatan usia harapan hidup sehingga membawa konsekuensi bertambahnya jumlah dan persentase penduduk usia lanjut.

Jika dilihat menurut sebarannya, penduduk lansia di provinsi Lampung masih didominasi oleh lansia yang tinggal di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan, yaitu 9,51 persen berbanding 8,44 persen. Perbandingan persentase yang tidak jauh berbeda juga tampak pada jenis kelamin lansia, dengan lansia berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (9,33 persen berbanding 9,04 persen).



Gambar 4.7. Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020

Berdasarkan data Susenas Maret 2020, terdapat empat Kabupaten/Kota yang telah memasuki fase struktur penduduk tua yakni persentase penduduk lansianya telah berada di atas 10 persen. Keempat kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lampung Tengah (16,96 persen), Kabupaten Lampung Timur (14,05 persen), Kota Bandar Lampung (13,20 persen) dan Kabupaten Lampung Selatan (10,73 persen).

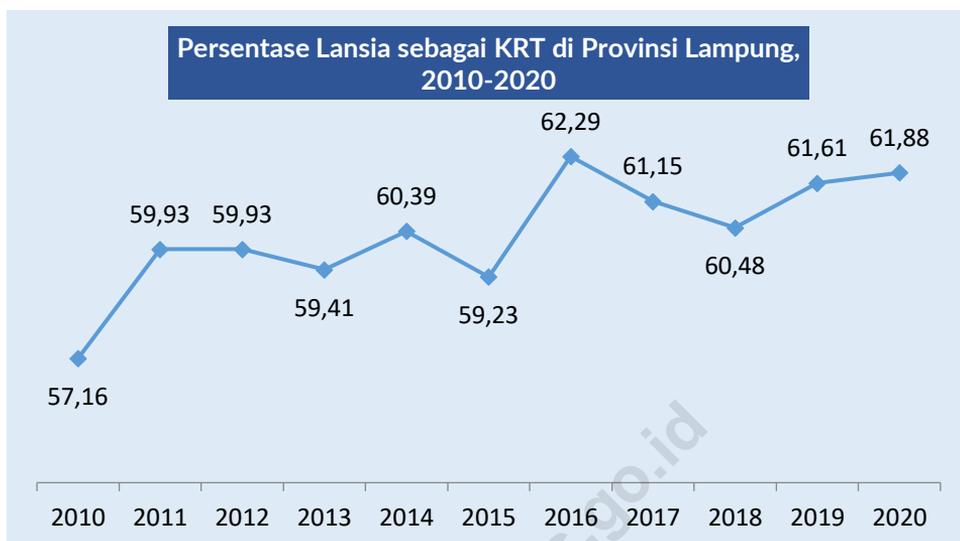


Gambar 4.8. Persentase Lansia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020

D. Lansia dan Keluarga

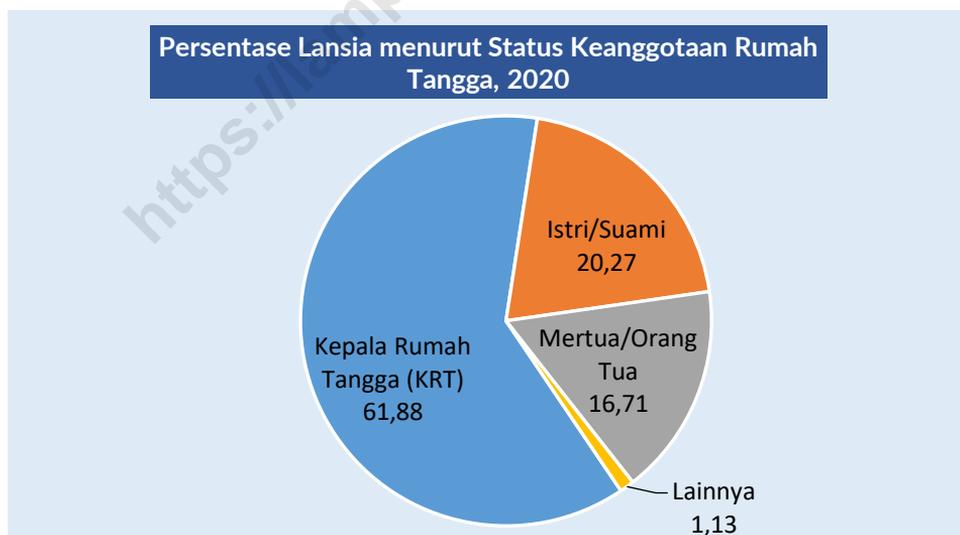
Bertambahnya jumlah lansia dari tahun ke tahun turut memengaruhi banyaknya jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Kondisi ini sangat penting untuk menjadi perhatian bagi seluruh pihak, baik keluarga, masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, dan pemerintah untuk dapat memberikan dukungan, baik sosial maupun ekonomi. Apalagi jika dilihat dari angka proyeksi penduduk Lampung tahun 2010-2045, penduduk lansia diprediksi akan semakin bertambah tiap tahunnya.

Bedasarkan gambar 4.9, terlihat bahwa persentase lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) pada tahun 2020 sebanyak 61,88 persen, tumbuh sebesar 8,26 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa enam dari sepuluh lansia di Provinsi Lampung masih terbebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota rumah tangganya dengan perannya sebagai KRT. Selain sebagai KRT, lansia di dalam rumah tangga juga berstatus sebagai suami/istri (20,27 persen), orang tua/mertua (16,71 persen) dan lainnya (1,13 persen).



Gambar 4.9. Persentase Lansia sebagai KRT di Provinsi Lampung, 2010-2020

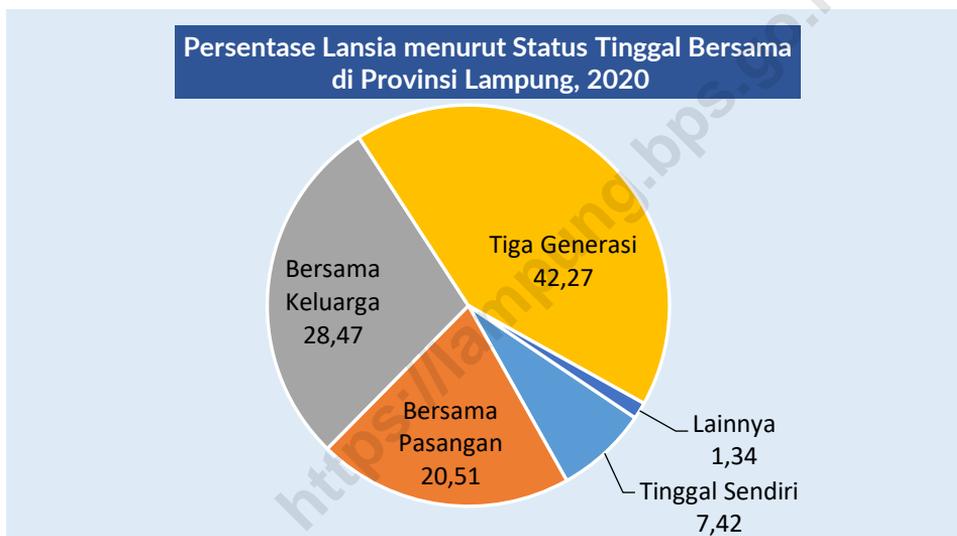
Tingginya persentase lansia yang berperan sebagai KRT tersebut merupakan prespektif sosial masyarakat Lampung yang menganut budaya timur, yaitu lansia harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda.



Gambar 4.10. Persentase Lansia Menurut Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2020

Secara umum, permasalahan psikologis yang dominan terjadi pada lansia yakni kesepian, kesepian dapat juga diartikan perasaan tersisihkan, terpercil dari orang lain, karena merasa berbeda dengan orang lain (Probosuseno dalam Sari, 2017). Dukungan sosial merupakan faktor utama yang melawan kesepian (Tomaka, Thompson, dan Palacios, 2006). Oleh karena itu, lansia dengan dukungan sosial yang besar kemungkinan besar memiliki tingkat kesepian yang lebih sedikit.

Dukungan sosial dapat berupa kesempatan para lansia merasa terhubung secara sosial, memiliki sumber daya sosial yang memadai, kedekatan dengan orang lain, atau juga suatu rasa kebersamaan dalam kelompok. Dalam masa tersebut, terlihat bahwa lansia bergantung kepada penduduk yang lain untuk mendapatkan dukungan/bantuan baik secara ekonomi maupun sosial. Tinggal bersama dengan keluarga adalah tempat terbaik guna menghabiskan masa tua karena keluarga masih menjadi pemberi dukungan utama dalam kelangsungan hidup lansia. Lansia akan bahagia jika memiliki kesehatan yang baik, lingkungan sosial yang kuat, kondisi ekonomi yang memadai serta hubungan interpersonal yang baik. Pendampingan pasangan atau keluarga inti akan sangat berarti dibandingkan dukungan dari orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Secara psikologis, adanya dukungan dan pendampingan dapat mengurangi risiko penyakit dan kematian pada lansia.

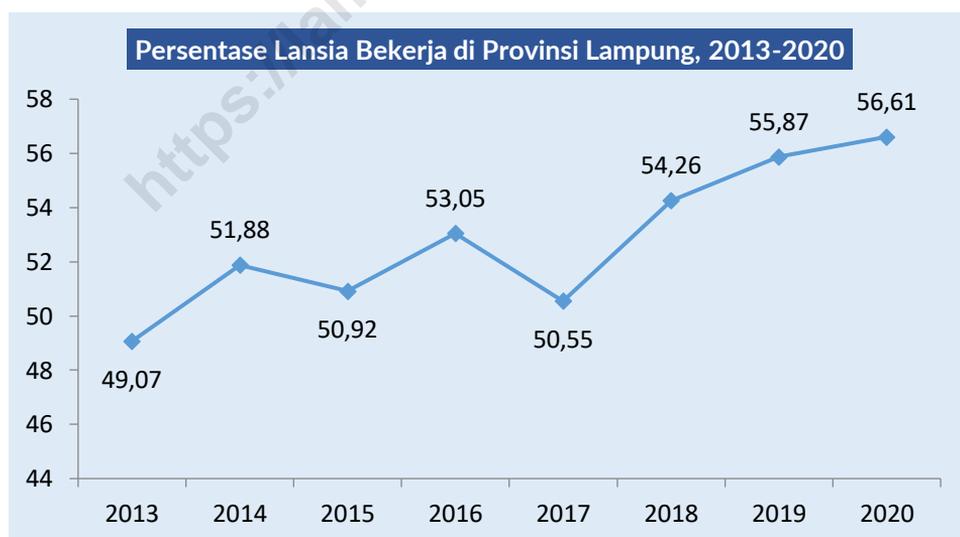


Gambar 4.11. Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama di Provinsi Lampung, 2020

Tempat tinggal lansia tidak dapat dipisahkan dari perawatan kesehatan lansia. Pada gambar di atas tampak bahwa terdapat variasi persentase penduduk lansia di Lampung berdasarkan status tinggal lansia, yakni lansia yang tinggal bersama pasangannya (20,51 persen), bersama keluarga (28,47 persen), dan tiga generasi (42,27). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa lansia yang masih memiliki pasangan, kebutuhan hidupnya diperhatikan oleh pasangannya. Di sisi lain, lansia yang berstatus sebagai orang tua/mertua, kehidupannya akan diperhatikan oleh anak atau menantunya. Faktor budaya dan agama di Provinsi Lampung diyakini berpengaruh dimana anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, termasuk merawat dan memberikan dukungan kepada orang tua (lansia). Anak masih dianggap sebagai tempat bergantung, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dengan dukungan keluarga, lansia akan merasa masih ada yang memperhatikan, sehingga mereka akan merasa bahagia dan secara psikologis akan meningkatkan kesehatan.

Sedangkan 7,42 persen lansia di Provinsi Lampung tinggal sendiri. Menurut WHO (1977) lansia yang tinggal sendiri digambarkan sebagai kelompok yang berisiko dan memerlukan perhatian khusus (Iliffe dkk. 1992). Permasalahan mengenai lansia yang tinggal sendiri membuka kemungkinan untuk penelitian lanjutan agar dapat mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi fenomena tersebut, dan menjawab pertanyaan apakah tinggal sendiri merupakan bagian dari pilihan hidup para lansia karena tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki keluarga, telantar atau disisihkan dari kehidupan keluarga besar mereka.

Bekerja tidaklah mengenal usia karena bekerja adalah hak segala usia. Di tengah kondisi penduduk dunia yang kian menua, banyak dijumpai lansia yang masih aktif dalam dunia kerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Keberadaan lansia dalam pasar kerja pada dasarnya tidak hanya mencerminkan kemampuan lansia untuk tetap bekerja, tetapi dapat juga dimaknai rendahnya tingkat kesejahteraan lansia, sehingga mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan jumlah lansia yang pesat, tidak diimbangi oleh peningkatan terhadap upaya-upaya jaminan sosial, sehingga banyak lansia dengan segala keterbatasan kondisi fisiknya masih tetap bekerja. Affandi (2009) mengemukakan tidak sedikit lansia yang masih menghidupi keluarga anaknya yang tinggal bersamanya, karena hidup dalam keluarga yang tidak mampu. Dengan kata lain tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang sangat besar dari sisi psikologis maupun ekonomis, masih diemban oleh penduduk lansia yang seharusnya menikmati hari tua tanpa beban berat keluarga.

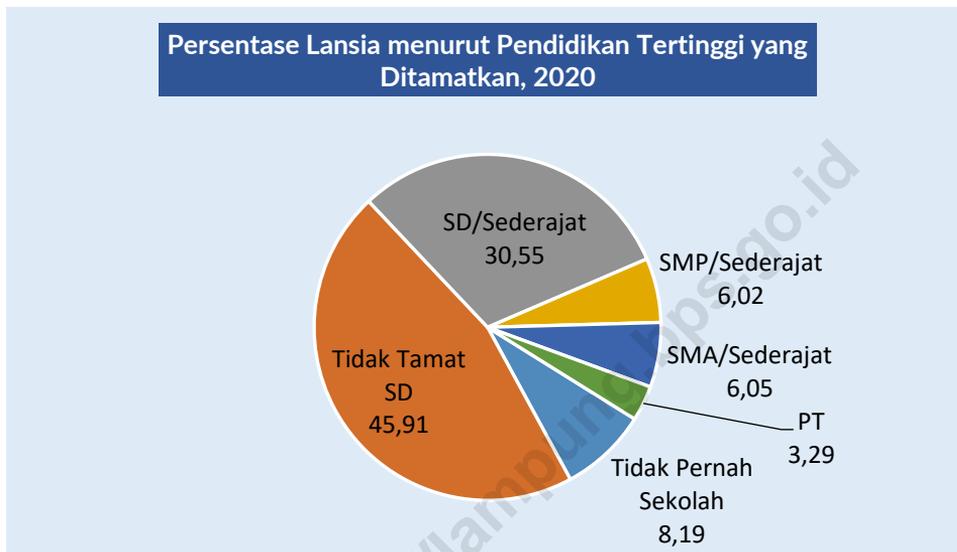


Gambar 4.12. Persentase Lansia Bekerja di Provinsi Lampung, 2013-2020

Gambar 4.12 memperlihatkan bahwa lebih dari separuh lansia sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 masih tetap aktif bekerja di usia senja mereka (56,61 persen). Banyak faktor yang dapat memengaruhi lansia untuk bekerja, terutama faktor sosial demografi dan sosial ekonomi. Wirakartakusumah & Anwar (1994), mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang memengaruhi lansia untuk bekerja. Pertama, masih banyak lansia yang tetap kuat secara fisik dan mental sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari pasar kerja. Kedua, terjunnya lansia ke

pasar kerja karena desakan ekonomi. Ketiga, alasan yang bukan didasarkan pada motif ekonomi, tetapi lebih didasarkan pada motif aktualisasi diri atau emosi.

Sebagian besar lansia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan kemampuan kerja dan produktifitas yang kian menurun. Oleh karenanya, lansia dalam memasuki pasar kerja akan cenderung menjalani sektor lapangan usaha yang sesuai dengan kapasitasnya.



Gambar 4.13. Persentase Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020

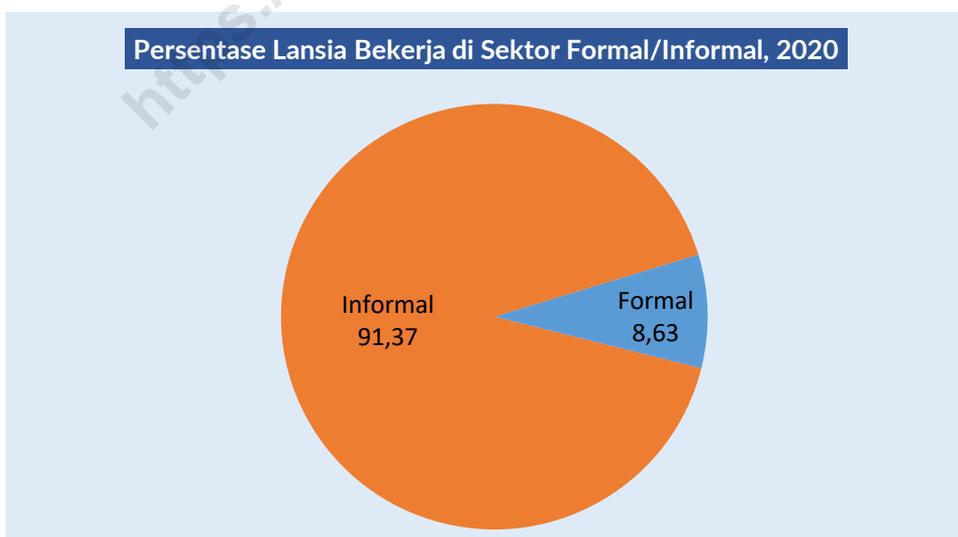
Semakin tinggi jenjang pendidikan lansia, semakin sedikit lansia yang bekerja di hari tuanya. Gambar 4.13 menunjukkan lansia yang bekerja didominasi oleh lansia berpendidikan rendah. Sebesar 54,10 persen lansia bekerja tidak pernah sekolah/tidak tamat SD dan sebesar 30,55 persen adalah tamat SD. Persentase lansia bekerja tamat SMP, SMA dan tamat PT berturut-turut adalah 6,02 persen, 6,05 persen dan 3,29 persen. Hal ini disebabkan karena lansia dengan tingkat pendidikan tinggi dulunya memiliki pekerjaan yang menjanjikan sehingga ketika mereka memasuki usia lanjut telah memiliki kekayaan yang cukup untuk masa tuanya, kontras dengan lansia yang berpendidikan rendah (ILO, 2015).

Lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lansia, yaitu sebesar 65,99 persen. Lapangan usaha sektor pertanian memang lebih terbuka untuk semua kalangan selama masih memiliki tenaga yang cukup karena tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu serta keahlian yang spesifik. Menjadi hal yang wajar bila pekerja lansia paling banyak terserap dalam lapangan usaha ini.



Gambar 4.14. Persentase Lansia Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020

Pada Gambar 4.15 terlihat bahwa sebagian besar lansia bekerja pada sektor informal (91,37 persen). Hal ini dapat disebabkan kesempatan kerja bagi para lansia di sektor formal yang memang sedikit karena sektor formal lebih mengedepankan kualifikasi dan keterampilan pekerja (ILO, 2014). Dengan kemampuan lansia yang sudah menurun secara fisik dan psikologis, tentu sektor informal menjadi pilihan bagi para pekerja lansia tersebut.



Gambar 4.15. Persentase Lansia Bekerja di Sektor Formal/Informal, 2020

Jika dilihat menurut tipe daerah, pekerja lansia yang berada di perdesaan lebih banyak yang bekerja di sektor informal dibandingkan pekerja lansia yang berada di perkotaan. Selain itu, pekerja lansia wanita lebih banyak yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan pekerja lansia laki-laki. Hal ini menggambarkan

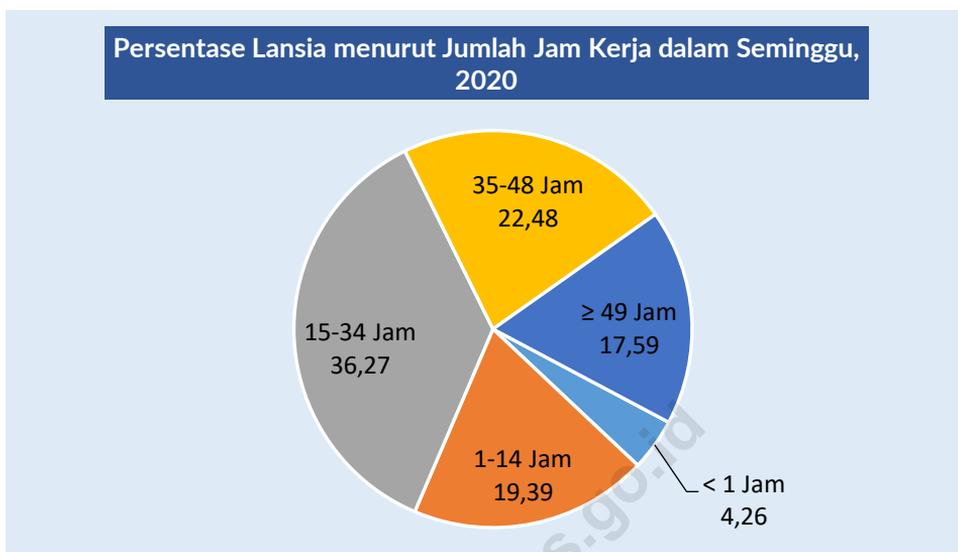
lansia wanita di perdesaan lebih banyak yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya.



Gambar 4.16. Persentase Lansia Bekerja di Sektor Informal Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Produktivitas lansia dan peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat melalui jumlah jam kerja. Seyogianya, jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi tidak lagi diutamakan pada kuantitas jam kerjanya, melainkan lebih kepada kualitas kerja yang tercermin keahlian dan pengalamannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Bahkan, terdapat lansia yang bekerja secara berlebihan, atau disebut *excessive hours*, yaitu dengan jumlah jam kerja lebih dari 48 jam dalam seminggu.

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa dari setiap 5 orang pekerja lansia, setidaknya ada 1 orang yang bekerja secara berlebihan dalam seminggu terakhir. Lansia tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Selain itu, jam kerja berlebih akan mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk, 2002). Sementara itu, pekerja lansia dengan jumlah jam kerja antara 15 - 34 jam sebesar 36,27 persen dan jumlah jam kerja antara 35 - 48 jam sebesar 22,48 persen.



Gambar 4.17. Persentase Lansia Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2020

Tingkat kesejahteraan lansia dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh lansia bekerja. Lansia memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, lansia bekerja biasanya memperoleh penghasilan yang lebih sedikit daripada kelompok usia produktif. Hal ini disebabkan adanya stigma bahwa produktivitas lansia menjadi rendah karena kondisi fisiknya yang lemah sehingga membuat upah atau pendapatan yang diterima lansia lebih rendah dibanding usia produktif. Padahal kebutuhan hidup lansia tidak jauh berbeda dari usia produktif. Bahkan terkadang lansia memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kesehatan dibanding usia produktif.



Gambar 4.18. Rata-rata Penghasilan Penduduk Lansia (Ribu Rupiah), 2014-2020

Jika dilihat dari gambar 4.18, rata-rata penghasilan lansia yang bekerja di Provinsi Lampung dalam 5 tahun terakhir cenderung stagnan. Sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 1,19 juta rupiah per bulan dari 1,31 juta rupiah per bulan dari tahun sebelumnya. Selain itu, ada sekitar 37,47 persen lansia bekerja yang memperoleh upah rendah. Upah rendah dijabarkan sebagai upah yang kurang dari dua per tiga upah median (BPS, 2018).

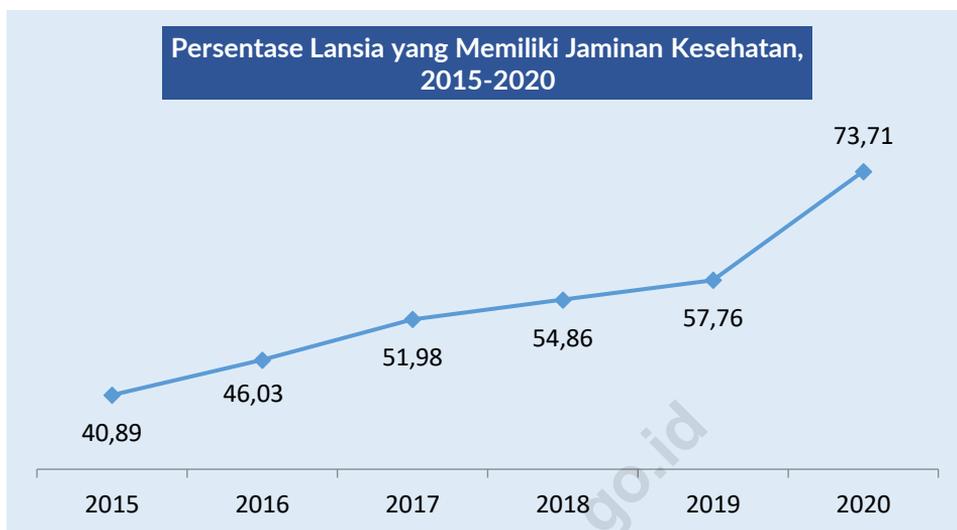
E. Perlindungan terhadap Lansia

Salah satu tujuan pembangunan di RPJMN 2020 - 2024 adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar, serta perlindungan sosial, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk lansia (Bappenas, 2019).

Ada 6 strategi yang tertuang pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lansia 2020-2024 sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kesehatan lansia, baik fisik maupun psikologis. Keenam strategi tersebut, yaitu:

1. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan dan regulasi serta norma, standar, prosedur, kriteria mengenai pelayanan kesehatan lansia;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas dan akses pelayanan kesehatan yang santun lansia serta perawatan jangka panjang;
3. Membangun dan mengembangkan kemitraan juga jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia yang melibatkan lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi, lembaga pendidikan, swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pihak terkait lainnya;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lansia;
5. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lansia dalam upaya peningkatan kesehatan lansia;
6. Meningkatkan peran serta lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Salah satu bukti telah berjalannya RAN Kesehatan Lansia 2020-2024 adalah terjadi peningkatan persentase lansia yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2020, yaitu menjadi 73,71 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 57,76 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase lansia laki-laki dan perempuan yang memiliki jaminan kesehatan cenderung sama, yaitu sekitar 73 persen. Akan tetapi, terdapat perbedaan persentase lansia yang memiliki jaminan kesehatan berdasarkan tipe daerah. Lansia yang memiliki jaminan kesehatan lebih banyak berada di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan (81,79 persen berbanding 70,50 persen).



Gambar 4.19. Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2015-2020



Gambar 4.20. Persentase Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Keluhan kesehatan yang dialami oleh lansia, baik yang mengganggu aktivitas sehari-hari maupun tidak mengganggu membutuhkan suatu tindakan pengobatan. Beberapa tindakan pengobatan yang menjadi alternatif pilihan bagi lansia untuk meredakan keluhan yang dirasa salah satunya dengan berobat jalan dan melakukan rawat inap.

Tabel 4.1. Persentase Lansia yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2020

Jenis jaminan Kesehatan	Menggunakan Jamkes untuk Berobat Jalan	Menggunakan Jamkes untuk Rawat Inap
BPJS PBI	64,63	57,47
BPJS non PBI	29,42	37,18
Jamkesda	5,90	4,69
Asuransi Swasta	-	-
Perusahaan/Kantor	0,20	0,66
Total Lansia Pengguna Jaminan Kesehatan	37,48	75,43

Berdasarkan tabel diatas, 37,48 persen lansia di Provinsi Lampung pada tahun 2020 menggunakan jaminan kesehatannya untuk berobat jalan. Selain itu, terdapat 75,43 persen lansia yang pernah menggunakan jaminan kesehatan untuk melakukan rawat inap. Dari kedua tindakan pengobatan tersebut sebagian besar menggunakan jaminan kesehatan BPJS PBI, yaitu sebesar 64,63 persen untuk berobat jalan dan 57,47 persen untuk rawat inap. Secara tidak langsung hal ini mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga lansia yang pada umumnya masih didominasi oleh kelompok pengeluaran rumah tangga 40 persen terbawah, tergolong fakir miskin dan tidak mampu, sehingga iurannya dibayarkan oleh pemerintah.



Gambar 4.21. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial, 2013-2020

Selain jaminan kesehatan, jaminan sosial yang juga diterapkan di Provinsi Lampung adalah jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sekitar 7 sampai 8 dari 100 rumah tangga lansia di Lampung memiliki jaminan sosial (Gambar 4.21) dengan persentase di perkotaan lebih dari tiga kali perdesaan yaitu 14,95 persen berbanding 4,73 persen (Gambar 4.22). Hal ini dimungkinkan karena adanya kecenderungan rumah tangga lansia yang tinggal di perkotaan banyak mendapat jaminan yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Akses dan fasilitas yang lebih baik tersebut memudahkan lansia di perkotaan untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.



Gambar 4.22. Persentase Rumah Tangga Lansia yang memiliki Jaminan Sosial yang Dimiliki menurut Tipe Daerah, 2020



Gambar 4.23. Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki, 2020

Jika dilihat menurut jenisnya, pada Gambar 4.22 terlihat bahwa jaminan sosial yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah jaminan pensiun/veteran (5,64 persen). Sementara itu, pesangon PHK merupakan jaminan yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga lansia, yakni kurang dari 2 persen.

Selain mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, lansia juga memperoleh bantuan sosial baik sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka, termasuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan RPJMN. Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Berdasarkan indeks bantuan sosial PKH tahun 2019, nilai bantuan lanjut usia adalah sebesar Rp2.400.000,00.

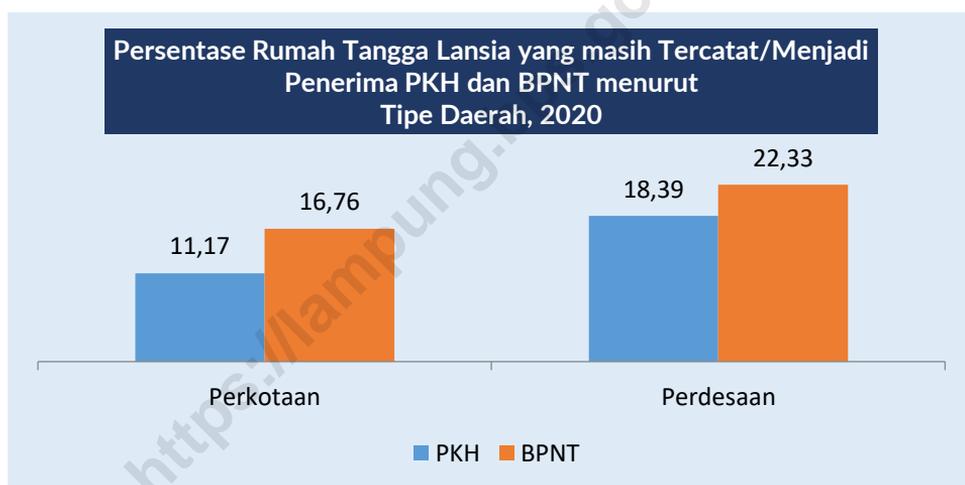
Sedangkan BPNT merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program subsidi beras sejahtera/rastra. Pelaksanaan BPNT menggantikan penyaluran beras langsung menjadi uang dalam kartu yang dapat dicairkan setiap bulannya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya, masyarakat dibebaskan dapat membeli kebutuhan pokoknya mulai dari beras, minyak goreng, membeli kebutuhan pangan berupa beras/telur di warung elektronik gotong royong (e-waroeng).



Gambar 4.24. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH, 2017-2020

Berdasarkan gambar diatas, persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat atau menjadi penerima PKH dalam 4 tahun terakhir terjadi peningkatan. Dari 5,54 persen pada tahun 2017 naik hampir 3 kali lipat menjadi 16,30 persen pada tahun 2020.

Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan (18,39 persen dibanding 11,17 persen). Hal yang sama terjadi pada penerima BPNT. Di wilayah perdesaan, persentase lansia penerima BPNT di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan (22,33 persen dibanding 16,76 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di perdesaan lebih sulit dibandingkan di perkotaan.



Gambar 4.25. Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH dan BPNT menurut Tipe Daerah, 2020

F. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan usia Harapan Hidup dan penurunan angka fertilitas dan mortalitas berdampak jumlah lansia semakin meningkat dan diperkirakan akan mencapai diatas 15 persen pada periode setelah bonus demografi.
2. Indikator Kelanjutusiaan menunjukkan perbandingan jumlah lansia semakin meningkat dibandingkan anak-anak dan menurunnya rasio dukungan penduduk usia kerja terhadap lansia.
3. Sebagian besar lansia merupakan kepala keluarga khususnya lansia laki-laki.
4. Masih banyak lansia yang tinggal sendiri khususnya lansia perempuan dan yang tinggal di perdesaan.
5. Setengah dari lansia masih bekerja.
6. Lansia merupakan pihak yang rentan dengan adanya pandemi.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Moertiningsih; Cicih, Lilis H. Mis; Asmanedi; Toersilaningsih, Soerani. (2018).
Menjadi Lansia: Antara Anugerah dan Tantangan. Dalam buku Memetik Bonus Demografi, Membangun Manusia Sejak Dini. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Analisis Isu Terkini 2019. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010. BPS, Jakarta.
- BPS, Bappenas, UNFPA. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 – 2045, Hasil SUPAS 2015. BPS, Jakarta.
- Higgins, Matthew and Williamson, Jeffrey G. (1997). Age Structure Dynamics in Asia and Dependence on Foreign Capital. *Population and Development Review* Vol. 23, No. 2 (Jun., 1997), pp. 261 – 293 (33 pages).
- Perlmutter, M. dan E. Hall. 1992. *Adult Development and Aging* (2nd Ed.). John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Swasono, Sri Edi dan Hatta, Meutia Farida. 1989. Proses Menua di Barat dan Timur: Suatu Tinjauan Antropologis. Makalah diajukan pada Seminar Sehari Tentang Usia Lanjut oleh Pusat Pengembangan Psikiatri dan Kesehatan Jiwa. Jakarta 14 Januari 1989.
- UNFPA (2014). Indonesia on the Threshold of Population Ageing. UNFPA Indonesia Monograph Series No 1, Juli 2014.
- World Health Organization. (2002). *Active Ageing: A Policy Framework*, “A Contribution of the World Health Organization to the second United Nation World Assembly on Aging”, Madrid, Spain, April 2002.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482909 Faks. (0721) 474329
Email : bps1800@bps.go.id, Web : www.lampung.bps.go.id